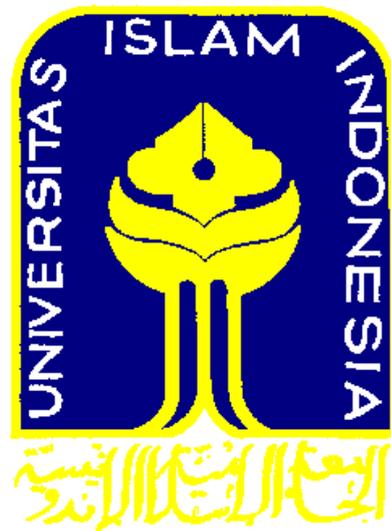


**PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE***  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di  
BEI Tahun 2015-2017)



**SKRIPSI**

Oleh:

Nama: Whilis Aziz Panji Pamungkas

No. Mahasiswa: 15312218

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2019**

**PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE***  
**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017)**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Whilis Aziz Panji Pamungkas

No. Mahasiswa: 15312218

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2019**

### **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di teribtkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 25 April 2019

Penulis,



(Whilis Aziz Panji Pamungkas)

**PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN MEKANISME *GOOD*  
*CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *CORPORATE SOCIAL*  
*RESPONSIBILITY DISCLOSURE***  
**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun  
2015-2017)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

Nama: Whilis Aziz Panji Pamungkas

No.Mahasiswa: 15312218

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal .....

Dosen Pembimbing,



(Noor Endah Cahyawati, SE., M.Si, Cert. SAP.)

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN MEKANISME GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

Disusun Oleh : **WHILIS AZIZ PANJI PAMUNGKAS**  
Nomor Mahasiswa : **15312218**

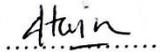
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 7 Mei 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Noor Endah Cahyawati, SE, M.Si, Cert. SAP.



Penguji : Ayu Chairina L., SE, M.App. Com. M.Res. Ph.D., Ak., CA.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## HALAMAN MOTO

**“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah.”  
(HR.Turmudzi)**

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  
(Q.S Al Insyirah: 5-6)**



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Manajemen Laba dan Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017)”**

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

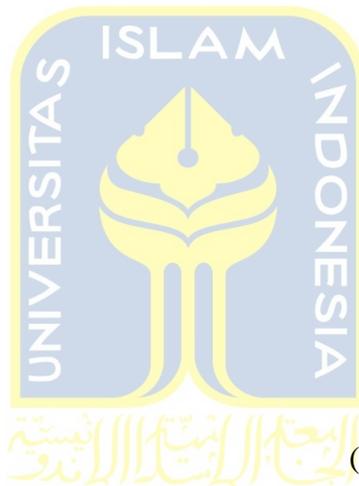
1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai ayah saya Winarto, A.Md dan ibu saya Nawang Sulistyani, S.Pd. yang tiada hentinya mendukung doa dan memberi dukungan yang luar biasa yang tidak dapat ternilai dan memberikan fasilitas kepada penulis agar dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
2. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Mahmudi, Dr., SE., M.Si., Ak. selaku ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana
4. Ibu Noor Endah Cahyawati, S.E., M.Si, Cert. SAP. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta

telah luar biasa sabar dalam memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis sampai terselesaikan skripsi ini.

5. Ibu Herlina Rahmawati Dewi S.E., M.Sc. selaku dosen wali selama penulis berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
7. Kakakku Almh Whilis Dyah Samanthsang yang selalu mendoakanku dari surga, Whilis Putri Pitaloka., S.I.P., M.Pd yang luar biasa mendukung doa dan selalu meberikan semangat, Whilis Intan Nandasari., S.Pd., M.Pd yang luar biasa dalam doa dan selalu menjadi teman curhat terbaik dan selalu medukung, terimakasih kepada srikandiku telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada my soulmate ku yang ku panggil “moonlight” terimakasih telah menjadi penerang dan penjaga dikala penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Keponakanku yang paling cantik Anindy Diora, Sahaquna Dyah, dan keponakanku yang paling tampan Sami Al Bara, selalu membuat ku tersenyum dikala jenuh skripsi.
10. Untuk teman-teman yang sudah mendukung skripsi saya rindang putri, amelia larasati, nastiti, dini hasinta dewi, risky hardian dan seluruh teman saya Akuntansi 2015 saya ucapkan terimakasih telah membantu saya selama ini.
11. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu perstau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna dan didalamnya banyak kekurangan karena pada dasarnya tidak ada ciptaan manusia yang sempurna. Oleh karena itu setiap kritik, saran dan masukan sangat diharapkan penulis agar menjadi karya yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan informasi. Akhir kata, terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada berbagai pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 25 April 2019

(Whilis Aziz Panji Pamungkas)

## Daftar Isi

Halaman Sampul .....	I
Halaman Judul.....	II
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
Halaman Pengesahan .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
Halaman Moto.....	III
Kata Pengantar .....	VII
Daftar Isi.....	X
Daftar Tabel .....	XIII
Daftar Gambar.....	XIII
Daftar Lampiran .....	XIII
BABA I PENDAHULUAN.....	1
1.1.    LATAR BELAKANG.....	1
1.2.    RUMUSAN MASALAH .....	7
1.3.    TUJUAN PENELITIAN .....	7
1.4.    MANFAAT PENULISAN .....	8
1.5.    SISTEMATIKA PENULISAN .....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
2.1.    LANDASAN TEORI .....	10
2.1.1. Teori Legitimasi ( <i>Legitimacy Theory</i> ) .....	10
2.1.2. Teori Stakeholder ( <i>Stakeholder Theory</i> ).....	11
2.1.3. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	12
2.1.4. Teori Kontrak Sosial ( <i>Social Contract Theory</i> ).....	13
2.1.5. <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	15
2.1.6. Manajemen laba .....	17

2.1.7.	<i>Good Corporate Governance</i> .....	21
2.2.	PENELITIAN TERDAHULU .....	24
2.3	PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	27
2.3.1.	Manajemen laba berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.....	27
2.3.2.	Ukuran Komite Audit Mempengaruhi Pengungkapan CSR .....	28
2.3.3.	Ukuran Dewan Komisaris Mempengaruhi Pengungkapan CSR .....	29
2.3.4.	Jumlah Rapat Komite Audit Mempengaruhi Pengungkapan CSR ..	30
2.3.5.	Kepemilikan Asing Berpengaruh Terhadap Pengungkapan CSR.....	31
2.3.6.	Kepemilikan Pemerintah Berpengaruh Terhadap Pengungkapan CSR .....	31
2.3.7.	Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Pengungkapan CSR....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....		34
3.1	POPULASI DAN PENENTUAN SAMPEL.....	34
3.1.1	Populasi.....	34
3.1.2	Penentuan Sampel .....	34
3.2	SUMBER DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	34
3.3	VARIABEL PENELITIAN .....	35
3.3.1	<i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> .....	35
3.3.2	Ukuran Dewan Komisaris .....	36
3.3.3	Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit.....	36
3.3.4	Kepemilikan saham pemerintah.....	36
3.3.5	Kepemilikan Asing.....	37
3.3.6	Komite Audit.....	37
3.3.7	Manajemen Laba.....	37
3.4.	VARIABEL KONTROL.....	40
3.4.1.	Ukuran Perusahaan.....	40
3.5.	METODE ANALISI DATA .....	40
3.5.1.	Statistik deskriptif .....	40
3.5.2.	Uji asumsi klasik.....	40

3.5.3. Analisis regresi berganda .....	42
3.5.4. Uji Hipotesis .....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	45
4.1. PROSES SAMPEL PENELITIAN .....	45
4.2. HASIL PENELITIAN .....	45
4.2.1 Statistik Deskriptif .....	45
4.1.3 Uji Asumsi Klasik .....	49
4.1.4 Analisis Regresi Linier Berganda .....	54
4.3. UJI HIPOTESIS .....	57
4.3.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	57
4.2.2. Uji statistik t .....	58
4.3. PEMBAHASAN .....	61
4.3.1 Pengaruh manajemen laba terhadap <i>corporate social reponsibility</i> .....	61
4.3.2 Pengaruh ukuran komite audit terhadap <i>corporate social reponsibility</i> .....	62
4.3.3. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap <i>corporate social reponsibility</i> .....	62
4.3.4. Pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap <i>corporate social reponsibility</i> .....	63
4.3.5. Pengaruh kepemilikan asing terhadap <i>corporate social reponsibility</i> .....	64
4.3.6. Pengaruh kepemilikan saham pemerintah terhadap <i>corporate social reponsibility</i> .....	64
4.3.7. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap <i>corporate social reponsibility</i> .....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	66
5.1. KESIMPULAN .....	66
5.2. KETERBATASAN .....	68
5.3. SARAN .....	69

DAFTAR PUSTAKA .....	71
----------------------	----

### DAFTAR TABEL

4.1 Tabel Pentuan sampel.....	46
4.2 Tabel Hasil Statistik Deskriptif.....	47
4.3 Tabel Uji Normalitas.....	51
4.4 Tabel Hasil Uji multikolonieritas.....	52
4.5 Tabel Hasi Analisis Linier Berganda.....	54
4.6 Tabel Hasil Kofisien Deteminan ( $R^2$ ).....	57
4.7 Tabel Hasil Uji t.....	57

### DAFTAR GAMBAR

2.1 Tanggungjawab Perusahaan Perspektif <i>Social Contract</i> .....	13
2.2 Model Penelitian.....	34
4.1 Gambar Histogram.....	49
4.2 Gambar Uji Heteroskedastisitas.....	53

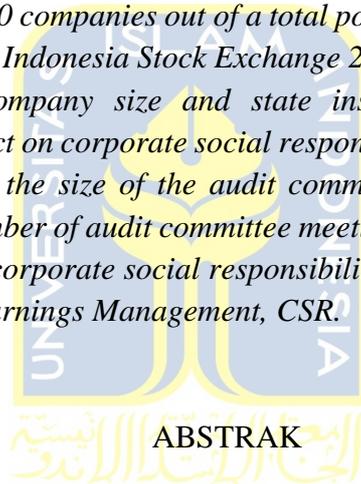
### DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. : Tabel kode perusahaan	
Lampiran II : Indikator aspek CSRDI	
Lampiran III : Rekapitulasi Item-item pengungkapan tanggung jawab sosial tahun 2015-2017	
Lampiran IV : Tabel Manajemen Laba	
Lampiran V : Tabel Ukuran Komite Audit	
Lampiran VI : Tabel Ukuran Dewan Komisaris	
Lampiran VII : Tabel Jumlah Rapat Komite Audit	
Lampiran VIII : Table Kepemilikan Asing	
Lampiran IX : Tabel Kepemilikan Insitusional Pemerintah	
Lampiran X : Tabel Ukuran Perusahaan	
Lampiran XI : Tabel Hasil Statistik	

## ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of earnings management and the mechanism of good corporate governance on corporate social responsibility disclosure in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2017. This study uses secondary data obtained by using purposive sampling method. The first independent variable of this study is the size of the audit committee, board size, number of audit committee meetings, foreign ownership, state institutional ownership, the second independent variable of this research is earnings management, and there are company size control variables. While the dependent variable is corporate social responsibility disclosure using guideline standards Global Reporting Initiative (GRI) in the assessment process. The sample used in this study was 40 companies out of a total population of 120 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2015 to 2017. The results of this study indicate that company size and state institutional ownership have a significant positive effect on corporate social responsibility disclosure. Meanwhile, earnings management, the size of the audit committee, the size of the board of commissioners, the number of audit committee meetings, foreign ownership did not significantly influence corporate social responsibility disclosure.*

**KEYWORDS:** *GCG, Earnings Management, CSR.*



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba dan mekanisme *good corporate governance* terhadap *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Variabel independen pertama dari penelitian ini adalah ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, kepemilikan asing, kepemilikan insitusional negara, Variabel independen kedua dari penelitian ini adalah manajemen laba, dan terdapat variabel kontrol ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependennya adalah *corporate social responsibility disclosure* dengan menggunakan standar pedoman *Global Reporting Initiative (GRI)* dalam proses penilaiannya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 40 perusahaan dari total populasi sebanyak 120 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2017. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan insitusional negara berpengaruh positif signifikan terhadap *corporate*

*social responsibility disclosure*. Sedangkan, manajemen laba, ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

**Kata Kunci:** GCG, Manajemen Laba , CSR.



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan salah satu dari tanggung jawab perusahaan kepada pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pemangku kepentingan dimaksudkan ialah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan (Post *et.al.*, 2002 dalam Solihin, 2009). Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Perusahaan akan mengungkapkan praktik tanggung jawab sosial agar bentuk kontribusi yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Pengungkapan tanggung jawab sosial atau sering disebut sebagai *corporate social responsibility reporting* adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray *et. al.*, 1987 dalam Rosmasita, 2007)

Konsep CSR sendiri muncul pada tahun 1960-an, ketika Amerika Serikat sedang berperang dengan Vietnam. Amerika Serikat bersama dengan negara-negara barat sekutunya, menghadapi aksi demokrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa yang memprotes adanya kecurangan sosial politik dan kolusi yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat dengan perusahaan setempat. Contohnya perusahaan *Dow Chemical* yang memproduksi bahan-

bahan kimia di Amerika Serikat bersama perusahaan ini membuat bahan kimia sebagai bahan dasar senjata untuk melawan Vietnam. Berton-ton limbah pabrik itu mencemari dataran, air dan udara, bahkan terdapat limbah nuklir yang beracun. Faktor ini lah yang menyebabkan munculnya gerakan antikonsumerisme dan antibisnis dikalangan pemuda Amerika Serikat, khususnya mahasiswa. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membuat instrument yang walapun masih bersifat sukarela (*voluantry*), bagi dunia usaha dalam mempromosikan HAM (Mardikanto, 2014).

Menurut Utama (2007) memaparkan bahwa praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia mulai berkembang seiring dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat global terhadap perkembangan perusahaan-perusahaan trans-nasional atau multinasional yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, hal ini juga terkait dengan isu kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia, seperti penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. Berbagai kasus pencemaran lingkungan seperti yang terjadi pada kasus PT. Semen Indonesia Tbk di Tuban banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan disekitar perusahaan beroperasi telah memberikan pelajaran bagi perusahaan-perusahaan untuk lebih peduli dengan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Perkembangan praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia juga dilatar belakangi oleh dukungan pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya regulasi terhadap kewajiban praktik dan pengungkapan CSR melalui Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pada pasal 66 ayat (2) menyatakan bahwa laporan tahunan dari perusahaan setidaknya tberisikan laporan keuangan maupun laporan non keuangan termasuk laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan tersebut. Dalam peraturan pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban perusahaan yang kegiatan usahanyaa berkaitan dengan sumber daya alam. Di dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nomor 29 /POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang

Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 29”) dan terdapat ketentuan penunjang Nomer 30 /SEOJK .04/2016 tentang bentuk dan isi laporan keuangan tahunan emiten atau perusahaan publik dimana di dalamnya terdapat pembahasan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan.

Perusahaan harusnya menyadari bahwa implementasi dan pengungkapan CSR akan memberikan nilai positif dalam hal aspek keuangan, citra merek dan keberlanjutan perusahaan tersebut. Menurut Laksmi dan Karmila (2018) memaparkan bahwa tanpa adanya pengungkapan CSR, masyarakat umum cenderung meragukan keberlangsungan suatu perusahaan dan oleh karena itu tidak ada investor yang mau berinvestasi di perusahaan itu. Dan menurut Priantana dan yustiana (2011) memaparkan bahwa komitmen suatu perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan aspek keuangan atau ekonomi, sosial dan lingkungan menjadi isu utama dari konsep CSR. CSR diarahkan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat bersama dengan peningkatan kualitas hidup mereka dan CSR juga diharapkan dapat membuat perusahaan dapat diterima dan berkelanjutan. Untuk mencapai keberlanjutan dan kelangsungan hidup, perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* secara konsisten dengan menjaga keseimbangan antara keinginan dari dalam dan luar perusahaan. Pengungkapan CSR akan menciptakan nilai tambah dan meningkatkan citra perusahaan tersebut di kalangan investor.

Seperti kita ketahui, pendapatan sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan mengenai pendapatan perusahaan, oleh karena itu, manajer diharapkan dapat mengelola pendapatan perusahaan dengan baik. Di Indonesia pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu bentuk partisipasi perusahaan dalam membangun negara dan mengurangi kemiskinan. Pengungkapan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dalam laporan keuangan perusahaan masih bersifat sukarela atau tidak wajib, perusahaan tidak

diharuskan mengungkapkan CSR dalam laporan keuangannya, terkecuali perusahaan yang kegiatan utama usahanya berkaitan dengan sumber daya alam seperti yang telah diatur dalam PP No. 47 Tahun 2012. Perusahaan dapat mengungkapkan kegiatan CSR atau tidak tergantung kebijakan perusahaan tersebut. Tetapi, saat ini sudah banyak perusahaan yang secara sukarela dan mandiri mengungkapkan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dalam laporan keuangannya, hal ini terjadi karena perusahaan menganggap adanya pertambahan nilai perusahaan yang berdampak pada kenaikan nilai saham. Perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tanggung jawab sosial tidak hanya meningkatkan kepuasan stakeholders, namun juga berdampak positif terhadap reputasi perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh Orlitzky (1999) dalam (Hadi 2011) memaparkan bahwa “pengungkapan informasi tentang perilaku dan hasil perusahaan mengenai tanggung jawab sosial dapat membantu membangun citra positif di antara para pemangku kepentingan.” Oleh karena itu, CSR merupakan salah satu strategi perusahaan untuk memperoleh citra yang lebih baik dimata stakeholders karena dengan kegiatan CSR, perusahaan mampu menunjukkan bentuk tanggung jawabnya terhadap lingkungan, karyawan, dan masyarakat yang ada disekitar perusahaan tersebut.

Menurut Sulistyanto (2008) memaparkan bahwa manajemen laba merupakan bentuk suatu upaya manajerial untuk merekayasa informasi keuangan dalam laporan keuangan selama masih dalam lingkup Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Dikarenakan praktik manajemen laba merupakan upaya manajemen untuk tidak memberikan informasi yang sesungguhnya kepada *stakeholder* demi memenuhi kepentingan pribadi manajer. Pada kenyataannya kegiatan CSR tidak hanya tentang tanggung jawab sosial kepada lingkungan dan masyarakat namun juga tentang kegiatan bisnis. Banyak perusahaan yang menjadikan CSR sebagai media promosi yang kemudian meningkatkan penjualan perusahaan dan mendatangkan keuntungan, CSR tidak hanya semata-mata mengeluarkan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk tanggung jawab sosial saja, tapi juga merupakan lahan bagi perusahaan untuk menaikkan pendapatan. Biaya dan pendapatan tersebut

kemudian dimanipulasi sedemikian rupa oleh manajemen agar memperoleh keuntungan yang perubahannya tidak terlalu signifikan.

Praktik manajemen laba sesungguhnya tentang kebebasan manajemen untuk memilih metode akuntansi dan nilai estimasi. Kebebasan memilih metode inilah yang memicu dan mendorong manajer untuk merekayasa informasi keuangan, sehingga manajer hanya memilih metode yang paling menguntungkan yang dapat mengoptimalkan kesejahteraannya. Selama metode yang dipilih masih didalam aturan standar akuntansi yang berlaku, maka upaya tersebut bukan merupakan kecurangan. Hal tersebut akan menjadikan pengguna laporan keuangan merasa kesulitan untuk menilai apakah laporan keuangan tersebut direkayasa atau tidak. Menurut Sulistyanto (2008) memaparkan bahwa ada dua keterbatasan pemakai laporan keuangan dalam menginterpretasikan laporan keuangan untuk mendeteksi manajemen laba. Pertama, kriteria penyajian laporan keuangan rawan terhadap kebijakan manajerial yang merupakan fleksibilitas dalam menghitung laba. Kedua, tidak ada observasi yang sempurna terhadap kebijakan manajerial mengingat tidak semua kebijakan manajerial dapat diobservasi oleh pemakai laporan keuangan. Oleh sebab itu, manajer bisa saja memanfaatkan peluang tersebut untuk menutupi kejadian yang sesungguhnya dan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan realita yang ada.

Selain menjadi alat perlindungan bagi manajemen untuk menutupi praktik manajemen laba, pelaksanaan dan pengungkapan CSR juga merupakan konsekuensi dari mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Ismail (2009) *Good Corporate governance* merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan . Dalam mekanisme *good corporate governance* terdapat lima prinsip yang menjadi dasar pelaksanaannya yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Pelaksanaan kegiatan perusahaan seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan termasuk kegiatan CSR, agar laporan keuangan tahunan tersebut transparan dan dapat menunjukkan akuntabilitas perusahaan.

Mekanisme *good corporate governance* juga memberi dampak positif terhadap pandangan *stakeholder* dan kelangsungan hidup perusahaan serta mengurangi ketidakcocokan informasi perusahaan. Murwaningsari (2009) memaparkan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran paradigma *good corporate governance* yaitu dengan memperluas paradigma teoretis dari *agency theory* menjadi *stakeholder theory perspective*. Akibat yang muncul dari pergeseran paradigma ini, *good corporate governance* harus mempertimbangkan dan memperhatikan masalah *corporate social responsibility* dalam suatu konteks historis dan filosofi.

Penelitian mengenai pengaruh manajemen laba, *good corporate governance* terhadap pengungkapan CSR telah banyak dilakukan, seperti Laksmi dan Kamila (2018), Istiqomah (2018), Hu, Zhu dan Hu (2016) dan Zulaikha (2014) Namun begitu hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi CSR masih tidak konsisten.

Laksmi dan Karmila (2018) meneliti tentang pengaruh manajemen laba dan mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di dalam bursa efek Indonesia tahun 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan negara dan komite audit memiliki efek positif yang signifikan terhadap pengungkapan sosial perusahaan tanggung jawab di perusahaan milik negara di Indonesia; sedangkan Komposisi dewan komisaris, kepemilikan asing dan manajemen laba tidak terbukti memiliki efek pada pengungkapan CSR.

Penelitian ini mencoba melakukan replikasi penelitian Laksmi dan Karmila (2018) dengan menambahkan variabel jumlah rapat komite audit dan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel control. Dengan demikian proksi mekanisme *Good Corporate Governance* pada penelitian ini adalah ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, kepemilikan asing, kepemilikan saham pemerintah dan variabel kontrol, ukuran perusahaan. Di dalam penelitian ini menggunakan perusahaan objek penelitian perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur banyak bersingungan dengan

lingkungan dan sosial, untuk dasar penilaian CSRDI peneliti menggunakan standard yang di keluarkan oleh GRI. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Manajemen Laba dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, variabel yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah manajemen laba dan mekanisme corporate governance dengan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
2. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
4. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
5. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
6. Apakah kepemilikan saham pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh manajemen laba terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran komite audit terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

3. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.
4. Untuk menguji pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.
5. Untuk menguji pengaruh kepemilikan asing terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.
6. Untuk menguji pengaruh kepemilikan saham pemerintah terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.
7. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

#### **1.4. Manfaat Penulisan**

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu Akuntansi Manajemen, terutama mengenai bagaimana penerapan GCG dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan untuk mengungkapkan praktik CSR-nya dalam laporan tahunan perusahaan.
2. Memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan dan manajemen tentang manfaat penerapan dan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan bagi perusahaan.
3. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dan lembaga-lembaga penyusun standar akuntansi dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada.
4. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab kedua merupakan kajian pustaka yang menguraikan landasan teori, penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis penelitian dan model penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang menguraikan populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian.

### **BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan analisis data yang menguraikan tentang pengujian hipotesis atas hipotesis yang telah dibuat, serta pembahasan dan hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang ada.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab kelima merupakan penutup yang menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, keterbatasan penelitian, saran, dan implikasi bagi penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi adalah teori berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate. Teori legitimasi adalah teori yang berfokus pada interaksi perusahaan dengan masyarakat. Legitimasi merupakan keadaan psikologi keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. Menurut O'Donovan (2002) di dalam (Hadi 2011) berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*). Menurut Dowling (1975) di dalam (Hadi 2011) berpendapat bahwa, Sejalan dengan karakternya yang berdekatan dengan ruanga dan waktu, legitimasi megalami pergeseran bersamaan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan dan masyarakat di mana perusahaan berada. Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat sebagai konsekuensi perkembangan peradabaan manusia, juga menjadi motivator perubahan legitimasi perusahaan di samping juga dapat menjadi tekanan bagi legitimasi perusahaan (Hadi 2011).

Menurut Gray 1996 dalam buku Hadi (2011) berpendapat bahwa legitimasi merupakan "*a systems oriented view of organisastion and society...permits us to focus on the role of information and*

*disclosure in the relationship between organization, the state, individual and group”*

Menurut Hadi (2011) definis tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan system pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada sosial, operasi perusahaan harus sama dengan harapan masyarakat. Legitimasi merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depannya. Hal itu, dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju.

#### **2.1.2. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)**

Teori stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Menurut Donaldson dan Preston di dalam buku Hadi (2011) berpendapat bahwa “*Stakeholder is a group or an individual who can affect, or be affect, or be affected by, the success or failure of an organization*”. Dengan demikian, stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaanya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan, Hadi (2011) . Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga dalam menjalankan organisasi tersebut perusahaan harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat. Norma masyarakat tersebut selalu berubah seiring dengan perubahan waktu sehingga perusahaan harus mengikuti perkembangannya (Ningsih, 2017).

Pada hakikatnya yang terdapat di dalam buku Hadi (2011) *stakeholder theory* mendasarkan diri pada asumsi, antara lain:

1. *The interests of all (legitimate) stakeholder have intrinsic value, and no set of interests is assumed to dominate the others (Donaldson & Preston, 1995).*
2. *The theory focuses on managerial decision making (Donaldson & Preston, 1995).*

Berdasarkan pada asumsi dasar *stakeholder theory* tersebut, perusahaan tidak bisa lepas dari lingkungan sekitar perusahaan. Perusahaan perlu menjaga legitimasi *stakeholder* (pemegang saham) serta menempatkannya dalam struktur kebijakan dan ikut andil dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu sebagai usaha dan jaminan *going concern*.

Menurut Hadi (2011) di dalam bukunya, esensi teori stakeholder tersebut di atas jika ditarik interkoneksi dengan teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi *expectation gap* dengan masyarakat (publik) sekitar guna meningkatkan legitimasi (pengakuan) masyarakat, ternyata terdapat benang merah. Untuk itu, perusahaan hendaknya menjaga reputasinya yaitu dengan menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata diukur dengan economic measurement yang cenderung shareholder orientation, ke arah memperhitungkan faktor sosial kemasyarakatan (*stakeholder orientation*).

### **2.1.3. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan adalah menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut (Jensen dan Meckling 1976). Teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan). Kontrak yang dimaksudkan di sini adalah

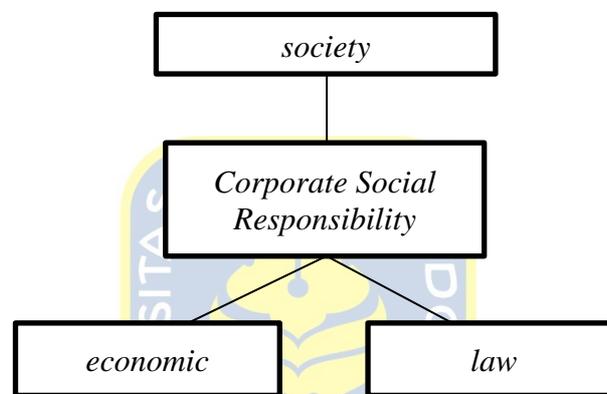
kontrak antara prinsipal (pemberi kerja, misalnya pemegang saham atau pimpinan perusahaan). Teori keagenan meramal jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal dan kepentingan agen dan prinsipal berbeda, maka akan terjadi *principal-agent problem* di mana agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal..

Menurut Gudono (2017) menjelaskan bahwa pandangan teori keagenan tersebut pada hakikatnya dibangun dengan memperluas teori yang dibahas dalam karya Coase, Berle, dan Means. Coase meletakkan landasan mengenai mengapa organisasi diperlukan. Coase mengakui bahwa baik solusi dengan pasar atautkah dengan organisasi keduanya sama-sama memiliki konsekuensi biaya yang di sebut *agency cost*. Dalam konteks ini *agency cost* adalah merupakan biaya (*transaction cost* atau lebih tepat lagi *cost of goveranance*) yang terjadi manaka solusi organisasi adalah yang dipilih (untuk mendistribusikan barang dan jasa dalam masyarakat). Barle dan Means telah menyoroti perilaku oportunistik manajer sebagai akibat kepemilikan saham perusahaan yang tersebar dan *corporate law* yang memberi kekuasaan terlalu besar pada manajemen yang merugikan pemegang saham. Namun begitu pandangan Barle dan Means masih terbatas pada hubungan antara manajemen dan pemegang saham. Konteks permasalahan prinsipal agen di dalam teori keagenan tidak terbatas ‘manajemen vs pemilik’ saja, melainkan bisa siapa pun selama kedua pihak terikat dalam kontrak dan hubungan mereka bias diposisikan sebagai hubungan prinsipal dengan agen.

#### **2.1.4. Teori Kontrak Sosial (*Social Contract Theory*)**

Kontrak sosial muncul karena adanya hubungan didalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian dan keseimbangan, termasuk terhadap lingkungan. Menurut Hadi (2011) perusahaan merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, pikiran dan berusaha mencapai tujuan secara bersama, adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang besar.

Jika dilihat dan ditelusuri, teori kontrak sosial berawal dari karya pemikiran Plato, *The Republic* (427SM-347SM). *Thomas Hobbes* (1588-1679) menjelaskan secara jelas tentang konsep *Social Contract Theory* pada abad 17 dalam karyanya yang berjudul *Le-Viathan*. Konsep tersebut terus berkembang dan dikembangkan oleh John Locke (1632-1704) di dalam buku Hadi (2011) yang menyatakan pada dasarnya bentuk dan sifat lingkungan sosial bersifat apolitical, dimana pelaku sosial memiliki tanggungjawab untuk mematuhi hukum alam yang sudah diatur .



Sumber: Crowther David (2008)

Gambar 2.1 Tanggungjawab Perusahaan Perspektif *Social Contract*

Gambar 2.1 di atas menjelaskan rumusan bahwa tanggungjawab perusahaan yang mana pemenuhan tanggungjawab tersebut tidak saling terlupakan. Sebagai pihak yang memiliki *social contract* perusahaan harus berupaya menjaga eksistensi dan konsistensi untuk peningkatan kinerja secara ekonomi (*profit*), tetapi perusahaan juga harus memperhatikan kaidah dan peraturan yang berlaku. Pencapaian tujuan ekonomi tidak sesuai dengan kaidah, maka harus diperbaiki dan mengikuti ketentuan kaidah yang berlaku, begitu juga dengan upaya dalam meningkatkan kinerja harus juga melakukan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini karena perusahaan berada ditengah lingkungan membutuhkan legitimasi masyarakat dalam maksud yang luas. Disitulah perlunya meningkatkan perhatian terhadap masalah sosial yang terdapat didalam strategi *corporate social responsibility* perusahaan. *Corporate Social responsibility* merupakan

tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan.

### **2.1.5. Corporate Social Responsibility**

*Corporate social responsibility* adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, keluarga mereka, masyarakat setempat, dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Menurut CSR *Europe* (2003) *corporate social responsibility* adalah cara perusahaan mengelola dan memperbaiki dampak sosial dan lingkungan untuk menghasilkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan berinovasi strategi, organisasi dan operasi. Menurut Bowen (1953) di dalam buku Mardikanto (2014) mendefinisikan bahwa CSR sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat.

Terkait dengan hal ini, Tanggungjawab sosial yang dinyatakan oleh Frederick (1960) di dalam Mardikanto (2014) menyatakan bahwa pengusaha harus mengawasi operasional dari sistem ekonomi yang memenuhi harapan publik. Ini berarti, pada gilirannya perekonomian harus dikerjakan sedemikian rupa agar mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Tanggungjawab sosial, dalam analisis terakhir menyiratkan sikap publik menuju sumberdaya untuk ekonomi dan manusia, dan sumberdaya yang digunakan tidak hanya dibatasi untuk kepentingan pribadi dan perusahaan, melainkan untuk tujuan-tujuan sosial yang lebih luas. Sedang menurut Hadi (2011) lebih menegaskan dengan menyatakan bahwa ide tanggungjawab sosial mengharuskan agar korporasi tidak hanya berkewajiban secara ekonomi dan hukum, tetapi juga tanggung jawab tertentu kepada masyarakat. Tanggung jawab sosial, oleh karena itu, mengacu pada kewajiban seseorang untuk mempertimbangkan dampak dari keputusan dan tindakannya pada sistem sosial secara keseluruhan. Pelaku bisnis,

menerapkan tanggung jawab sosial ketika mereka mempertimbangkan kebutuhan dan minat orang lain yang mungkin terpengaruh oleh tindakan bisnis.

Singkatnya, konsep baru tanggungjawab sosial mengakui keintiman hubungan antara perusahaan dan masyarakat dan menyadari bahwa hubungan tersebut harus selalu di inggat oleh manajer puncak korporasi dan kelompok-kelompok yang terakait dengan upaya manajer dengan tujuan masing-masing. Menurut Mardikanto (2014) menjelaskan bahwa konsep tanggungjawab menekankan bahwa unsur penting dari tanggung jawab sosial korporasi meliputi tingkat kerelawanan, sebagai lawan pemaksaan, sebuah hubungan tidak langsung dengan organisasi relawan lain untuk korporasi, dan pemahaman bahwa biaya yang terlibat untuk sesuatu yang tidak mungkin seharusnya di dapat digunakan untuk mengukur pengambilan ekonomi yang terukur secara langsung.

Dalam hubungan ini, peran korporasi tidak sekedar memaksimalkan keuntungannya, tetapi juga memaksimalkan aspek lainnya. Ini berarti bahwa, korporasi tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi dan hukum, tetapi juga tanggungjawab sosial kepada masyarakat, yang melampaui kedua tanggungjawab tersebut. Sejalan dengan itu, *committee for economic development* (CED) pada tahun 1971 melalui pengamatan bahwa fungsi bisnis (dengan persetujuan umum) tujuan dasarnya adalah untuk melayani, secara konstruktif, kebutuhan masyarakatnya yang melampaui kedua tanggungjawab tersebut.

Hal tersebut mencakup tanggungjawab untuk melaksanakan fungsi ekonomi dengan kesadaran sensitive terhadap perubahan nilai-nilai sosial dan prioritas: misalnya, sehubungan dengan pelestarian lingkungan, perekrutan dan hubungan dengan karyawan, dan harapan yang lebih lebih ketat dari pelanggan untuk informasi, perlakuan yang adil, dan perlindungan dari cedera. Hal tersebut telah dipertegas lagi dengan pernyataan oleh Steiner (1971) didalam (Mardikanto 2014) yang menyatakan pandangannya sebagai berikut:

Bisnis harus tetap fundamental sebagai lembaga ekonomi, tapi. Itu juga memiliki tanggungjawab untuk membantu masyarakat mencapai tujuan dasar. Oleh karena itu, memiliki tanggungjawab sosial. Semakin besar sebuah perusahaan, semakin besar tanggungjawab ini, tetapi semua perusahaan dapat menganggap beberapa bagian dari mereka tanpa biaya demi keuntungan jangka-pendek serta keuntungan jangka panjang, (Steiner 1971).

Asumsi tanggungjawab sosial lebih dari sikap, dari cara manajer melaksanakan tugasnya, mengambil keputusan, dari pergeseran besar pengambilan keputusan ekonomi. Ini adalah filosofi yang terlihat pada kepentingan sosial dan kepentingan bisnis pribadi, dalam jangka panjang, dibandingkan dengan kepentingan pribadi yang sempit, dalam jangka pendek, (Steiner 1971).

#### **2.1.6. Manajemen laba**

Manajemen laba adalah sebuah aktifitas atau kegiatan manajerial untuk merekayasa informasi di dalam laporan keuangan untuk mengelola laba tapi tidak keluar dari dasar prinsip akuntansi berterima umum (PABU). Menurut Sulistyanto (2008) memaparkan bahwa manajemen laba adalah pilihan kebijakan akuntansi atau aksi nyata yang dipilih oleh manajer untuk mempengaruhi pendapatan sehingga mencapai tujuan pelaporan yang spesifik. Manajemen laba juga sering dikatakan sebagai upaya manajerial untuk merekayasa laporan keuangan dengan memanfaatkan kebijakan bebas memilih metode akuntansi dan untuk menentukan sebuah nilai estimasi akuntansi. Kebijakan bebas memilih metode lah membuat manajerial memanfaatkan ini untuk mengelola laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan informasi seharusnya.

Menurut Sulistyanto (2008) memaparkan bahwa ada beberapa hipotesis yang terdapat didalam teori akuntansi positif yang digunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan.

1. *Bonus plan hypothesis yang menyatakan bahwa perencanaan bonus atau kompensasi manajerial akan lebih memilih metode-metode*

akuntansi yang dapat meningkatkan laporan laba menjadi lebih tinggi. Perjanjian bonus ini lah membuat para manajer mengelola dan mengatur laba pada tingkatan tertentu agar manajer akan dapat menerima bonus.

2. *Debt (equity) hypothesis* ini akan masuk ke dalam konteks perjanjian kewajiban hutang perusahaan, manajer akan mengelola bagaimana perusahaan dapat menanguhkan kewajiban hutangnya seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditanggihkan di tahun berikutnya.
3. *Political cost hypothesis* ini menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil dan memperbesar laba perusahaan cara ini dilakukan untuk menghindari regulasi pemerintah dalam hal perpajakan.

Ketiga hipotesis di atas adalah sisi lain dari teori agency yang menekankan pentingnya pemisahan antara pemilik dan pengelola, hal tersebut dimaksud agar tata kelola perusahaan berjalan dengan lebih baik. Sebagai penerima wewenang ini artinya manajer berkerja untuk pemilik, namun yang terjadi adalah terkadang manajer berkerja untuk kepentingannya sendiri dan manajer mengubah informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan agar pihak yang menerima informasi itu menjadi keliru dalam pengambilan keputusan ekonomi, upaya mengubah informasi di dalam laporan keuangan yang tidak sesuai dengan fakta itu disebut sebagai manajemen laba.

Ada beberapa cara perusahaan mempermainkan besar kecilnya laba dengan cara mengakui dan mencatat pendapatan terlalu cepat atau terlalu lama dan mencatat pendapatan palsu. (1) Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat dalam satu periode atau lebih, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan laba periode berjalan menjadi lebih besar dari pada laba sesungguhnya. Upaya ini dimaksudkan agar perusahaan dapat mempengaruhi investor akan mau membeli sahamnya, dan akan menaikkan posisi perusahaan ke posisi yang lebih baik. (2) Mengakui pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih, upaya ini dilakukan perusahaan agar kinerja

perusahaan menjadi lebih buruk dibandingkan periode terdahulu, ini di buat oleh perusahaan agar mempengaruhi investor untuk menjual sahamnya dan akan membuat kecilnya pajak yang harus di bayar perusahaan. (3) Mencatat pendapatan palsu, upaya ini dilakukan perusahaan agar kinerja perusahaan di anggap baik karena mengalami peningkatan penjualan ini di harapkan mempengaruhi investor untuk mengambil keputusan membeli saham perusahaan. (4) Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat , cara ini di lakukan agar biaya periode berjalan menjadi lebih besar dari pada sesungguhnya. (5) Mengakui dan mencatat biaya lebih lambat, cara ini di lakukan agar biaya perusahaan menjadi keci dan menyebabkan laba perusahaan menjadi meningkat, upaya ini dilakukan agar kinerja perusahaan menjadi lebih baik. (6) Tidak mengungkapkan semua kewajiban, cara ini dilakukan agar kewajiban perusahaan menjadi lebih kecil dan menyebabkan biaya bunga periode berjalan menjadi lebih kecil. Ada tiga pendekatan secara umum untuk melihat atau mendeteksi terjadinya manajemen laba menurut (Sulistyanto, 2008).

#### 1. Model Berbasis *Aggregate Accrual*

Model pertama ini adalah model yang berbasis *aggregate accrual* yaitu model yang digunakan untuk mendeteksi apakah ada aktifitas rekayasa ini dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai dasar manajemen laba. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Healy, DeAnglo dan Jones dan model ini lalu dikembangkan lagi Dechow, Sloan dan Sweeney.

Model Healy adalah metode yang sangat sederhana karena model ini menggunakan total akrual sebagai proksi manajemen laba. Total akrual sendiri merupakan penjumlahan dari *discretionary accruals* dan *nondiscretionary accruals* . *Discretionary accruals* sendiri adalah komponen akrual yang dapat direkayasa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan manajerial, sementara *nondiscretionary accruals* adalah komponen yang tidak dapat direkayasa maupun diatur sesuai dengan kebijakan manajer perusahaan.

Model Healy ini memiliki kelemahan karena model ini memasukan komponen nondiscretionary accruals sebagai proksi manajemen laba, model ini seolah-olah menganggap manajer dapat mengatur dan merekayasa semua komponen akural tanpa terkecuali. Hal ini sangat bertentangan dengan dasar filosofi akuntansi yang menyebutkan bahwa manajer tetap memiliki keterbatasan dalam hal mengatur besar kecilnya akural.

Model DeAngelo metode ini menggunakan perubahan dalam total akural sebagai proksi manajemen laba. Model Jones adalah model yang di modifikasi menggunakan sisa regresi total akural dari perubahan penjualan dan bangunan, tanah dan perlengkapan, di mana pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang yang terjadi pada periode bersangkutan.

2. Model Berbasis *Spesific Accruals*

Model kedua ini merupakan model yang berbasis akural khusus, yaitu merupakan pendekatan yang menghitung akural sebagai proksi manajemen dengan menggunakan komponen dari laporan keuangan tertentu dari industri tertentu, contohnya piutang tidak tertagih dari sector tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industry asuransi, model ini dikembangkan oleh McNicholas dan Wilson.

3. Model Berbasis *Distribution Of Earning After Management*

Sementara untuk model *distribusi of earning* dikembangkan oleh Burgtähler dan Dichev, DeGeorge, Patel dan Zeckhauser, serta Myers dan Skinner. Pendekatan ini dibentuk dari pengujian secara statistik terhadap masing-masing komponen laba. Model ini hanya berfokus pada pergerakan laba saja disekitar benchmark yang dipakai, misalkan laba kuartal sebelumnya, untuk menguji apakah insidenc jumlah yang berada diatas maupun dibawah bnancmark telah didistribusikan secara merata, untuk direfelksikan ketidak berlanjutan kewajiban untuk mejalankan ketidak berlanjutan (Sulistyanto, 2008).

Model Burgatahler dan Dichev ini merupakan model yang menguji frekuensi realisasi laba tahunan dari laba yang terendah hingga laba yang tertinggi. Selanjutnya DeGeorge, Petel, dan Zackhaoser mengembangkan model yang baru dengan menguji frekuensi realisasi laba kuartalan dari nilai yang tertinggi hingga kenilai yang paling rendah untuk mendeteksi manajemen laba.

Di bidang akademis telah banyak model dari perkembangan manajemen laba tapi setiap model memiliki ciri khas masing-masing dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing. Namun sejauh ini hanya model akural basis lah yang dapat diterima, karena model ini memberikan hasil yang cukup kuat untuk mendeteksi keberadaan manajemen laba.

#### **2.1.7. *Good Corporate governance***

*Good Corporate governance* adalah konsep yang berkembang karena adanya tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Menurut Sulistyanto (2008) menyatakan bahwa konsep *Good corporate goveranance* juga muncul juga karena adanya pemisahan antara hak pemilik selaku pemberi modal dan manajemen selaku pengelola dan penerima modal karena pemisahan ini dilakukan agar tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik dan juga agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang efisien karena perusahaan sudah dikelola oleh orang-orang yang sudah profesional.

Oleh karena itu untuk menjalankan tugasnya, maka para profesional adalah sebagai agent yang diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk mengelola perusahaan secara penuh. Sebagai imbalan atas kerjanya maka agen tersebut berhak menerima penghargaan berupa gaji dan bonus sesuai dengan kinerja yang telah agen tersebut capai. Namun disisi lain pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan ini memiliki sisi negative, memberikan wewenang dan keleluasa agen dalam hal memaksimalkan laba perusahaan mengarah pada kepentingan pribadi

dengan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Seharusnya sebagai agen harus mementingkan kesejateran pemilik bukan meningkatkan kesejahteraan pribadinya.

*Good corporate governance* dapat diartikan sebuah system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan tersebut dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua pemegang saham. Ada dua hal yang harus ditekankan di dalam konsep ini, yaitu hak dan kewajiban dari pemegang saham harus dapat dipenuhi oleh perusahaan. Artinya semua pemegang saham memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi yang sama tanpa terkecuali, sedangkan perusahaan memiliki kewajiban harus menyediakan informasi tentang bagaimana kinerja perusahaan tersebut dalam satu priode dan semua informasi yang disampaikan atau disajikan harus lah akurat dan transparant.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan mekanisme utama dalam melindungi dan melaksanakan hak-hak pemilik saham. Di dalam RUPS, pemegang saham yang memiliki porsi lebih besar dapat memiliki hak lebih besar di dalam memberikan suara dan menentukan arah perusahaan kedepannya, dan berhak mendapatkan informasi yang sangat material dari perusahaan dan dapat menentukan besarnya laba perusahaan yang akan dibagi kepada pemegang saham lain. RUPS di laksanakan sekali atau dua kali dalam satu tahun periode sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing perusahaan untuk RUPS luar biasa dapat di laksanakan kapan saja bila diperlukan dan telah memenuhi syarat khusus.

Komite audit yang bertugas melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektifitas dalam menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan internal yang memadai (Sulistyanto, 2008). Komite audit merupakan bagian terpenting dalam keberhasilan dari penerapan *Good Corporate Management* dalam fungsi pengawasan pelaksanaan operasional perusahaan. Ada beberapa aspek

pengawasan yang harus dilakukan komite audit agar terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih dan bertanggung jawab.

a. Penyusunan laporan keuangan.

Pihak yang berhak dan bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan adalah manajer dan dewan komisaris. Sedangkan komite audit sebagai pengawas independen atas proses penyusunan laporan keuangan dan pelaksana audit ekstern untuk memastikan agar laporan keuangan yang manajer tidak ada salah saji, cara ini agar meningkatkan kualitas laporan keuangan, Sulistyanto (2008).

b. Manajemen resiko dan pengendalian

Sebagai manajer dan dewan komisaris memiliki tanggung jawab terhadap manajemen resiko dan control dari perusahaan tersebut. Sementara itu, komite audit memberikan pengawasan atas semua proses pengelolaan resiko, apabila komite audit menemukan pelanggaran peraturan maka komite audit berhak melaporkan masalah ini kepada dewan komisaris. Untuk itu komite audit memiliki peran dan tanggung jawab antara lain. (1) Melakukan pengawasan dan mengendalikan resiko, control di dalam proses bisnis perusahaan. (2) Mampu menilai ruang lingkup pemeriksaan audit internal dan eksternal untuk memastikan bahwa bidang yang beresiko memerlukan pengendalian yang baik. (3) Memastikan seluruh manajer telah melaksanakan semua rekomendasi tentang resiko dan pengendaliannya, Sulistyanto (2008).

c. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang diambil dari pihak luar atau pihak eksternal yang dipilih dan diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komisaris independen memiliki misi yang diemban, pertama terciptanya objektifitas dan keadilan untuk semua kepentingan sebagai prinsip

utama pembuatan keputusan manajerial, kedua agar diterapkannya *good corporate governance* dengan baik.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Selain berpedoman pada teori-teori yang diperoleh dari literatur-literatur yang dijadikan acuan, penelitian ini juga melihat dari penelitian-penelitian yang serupa yang telah dilakukan terlebih dahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian ini disajikan dibawah ini :

Laksmi dan Kamila (2018), meneliti tentang pengaruh manajemen laba dan mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Penelitian tersebut menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di dalam bursa efek Indonesia tahun 2013-2015 dalam penelitian ini menggunakan Variabel dependen adalah tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan dan diungkapkan di perusahaan laporan Tahunan. Sebuah regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data dari penelitian ini menggunakan Perangkat lunak SPSS versi 17.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan negara dan komite audit memiliki efek positif yang signifikan terhadap pengungkapan sosial perusahaan tanggung jawab di perusahaan milik negara di Indonesia. Hasilnya juga menunjukkan bahwa Komposisi dewan komisaris, kepemilikan asing dan manajemen laba tidak memiliki efek pada pengungkapan CSR.

Istiqomah (2018), meneliti tentang pengaruh manajemen laba dan mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan variabel independen manajemen laba dan mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan jumlah rapat komite audit, sedangkan variabel dependennya adalah *corporate social responsibility*

*disclosure* dengan menggunakan standar pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) dalam proses penilaiannya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 71 perusahaan dari total populasi sebanyak 151 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris dan jumlah rapat komite audit berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Sedangkan, manajemen laba, Proporsi dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Wardani dan Muid (2017), meneliti tentang pengaruh agresivitas pajak, ukuran dan profitabilitas terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak, ukuran dan profitabilitas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol, yaitu leverage, intensitas modal dan *rasio market to book*. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2015. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 153 perusahaan. Data kemudian dianalisis menggunakan regresi kuadrat terkecil biasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak dan ukuran perusahaan secara signifikan dan positif berhubungan dengan CSR. Hasil ini sesuai dengan teori legitimasi. Namun, profitabilitas tidak terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hu, Zhu dan Hu (2016), meneliti tentang pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan insitusal, kepemilikan asing dan kepemilikan perusahaan. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 491 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek China selama 2010. Hasil dari penelitian ini kepemilikan insitusal, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR di china, sedangkan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di china.

Susilo dan Midawati (2015), tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian tersebut menggunakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di BEI periode 2010-2013 sebagai objek penelitian. Dalam penelitian Susilo dan Midawati (2015) menggunakan pengungkapan CSR perusahaan sebagai variabel dependen, dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham terkonsentrasi, kepemilikan saham publik sebagai variabel independen, serta ukuran perusahaan dan leverage sebagai variabel kontrol. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda. Penelitian Susilo dan Midawati (2015) memberikan hasil bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan saham publik, kepemilikan saham terkonsentrasi, ukuran perusahaan, dan leverage secara parsial tidak mempengaruhi pengungkapan CSR perusahaan.

Zulaikha (2014), melakukan penelitian tentang pengaruh manajemen laba, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap *Corporate Social Reporting*. Obejek penelitian tersebut menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011. Variabel dependen tersebut adalah *corporate social and environmental disclosure (CSR)* sementara variabel independen penelitian tersebut adalah manajemen laba, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap CSR sementara kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap CSR.

Priantana dan Yustian (2011), meneliti pengaruh tentang struktur *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan CSR. Objek penelitian tersebut menggunakan perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2007 dan 2008. Penelitian tersebut menggunakan pengungkapan CSR sebagai

variabel dependen, dan variabel independen penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran dewan komisaris, dan komposisi dewan komisaris. Analisis penelitian tersebut menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan institusional, komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Waryanto (2010), melakukan penelitian tentang menganalisis faktor karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada Laporan Tahunan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Faktor-faktor karakteristik *Good Corporate Governance* yang digunakan antara lain ukuran Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Komisaris, independensi Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, jumlah rapat Komite Audit, kompetensi Komite Audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham asing, kepemilikan saham terkonsentrasi, ukuran perusahaan dan rasio *leverage*. Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008. Total sampel penelitian adalah 116 perusahaan yang ditentukan melalui purposive sampling. Penelitian ini menganalisis pada laporan tahunan perusahaan dengan metode Content analisis. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kepemilikan saham terkonsentrasi, ukuran perusahaan, dan rasio *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia.

## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1. Manajemen laba berpengaruh terhadap pengungkapan CSR**

Manajemen laba merupakan upaya manajemen untuk merekayasa besar kecilnya laba perusahaan dengan memanfaatkan kebebasan pemilihan metode dan nilai estimasi akuntansi selama ketentuan tersebut

masih dalam ruang lingkup prinsip akuntansi berterima umum (PABU). Dasar teori yang mendasari adanya manajemen laba adalah teori agensi, yang menjelaskan bahwa manajemen memiliki keunggulan informasi dibandingkan pemegang saham, dan kepentingan manajemen dan pemegang saham berbeda, maka akan terjadi *principal-agent problem* di mana agen (manajemen) akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal (pemegang saham), teori yang menadasari lainya adalah teori stakeholder.

Manajemen laba yang dilakukan manajemen yang terdapat di dalam pelaporan keuangan ini dapat mempengaruhi pengungkapan kegiatan perusahaan, karena di dalam pelaporan keuangan tahunan terdapat laporan *corporate social responsibility*, informasi yang terdapat di dalam pelaporan keuangan akan menjadi peluang manajemen melakukan rekayasa terhadap laba perusahaan. Untuk merekayasa laba tersebut manajemen akan membuat pelaporan keuangan yang sulit untuk dipahami penggunaanya dengan cara mengungkapkan sedikit kegiatan yang telah dilakukan perusahaan. Semakin besar manajemen laba yang dilakukan manajer maka semakin sedikit pengungkapan kegiatan dalam laporan keuangan. Hal tersebut berarti, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap pengungkapan kegiatan CSR. Berdasarkan pada penjelasan di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

**H1: Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR**

### **2.3.2. Ukuran Komite Audit Mempengaruhi Pengungkapan CSR**

Komite audit adalah komite yang membantu komisaris atau dewan pengawas memastikan efektivitas pengendalian internal dan kinerja auditor eksternal (Priantana dan Yustian, 2011). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Nomor 55 / POJK.04 / 2015 tentang penetapan dan pedoman pelaksanaan komite audit. Di dalam pasal 4, menjelaskan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang

anggota: satu komisaris independen dan dua anggota dari luar penerbit perusahaan publik. Komite audit membantu dewan komisaris melakukan pengawasan untuk memastikan sistem pengendalian internal perusahaan telah terlaksana dengan efektif dan memantau efektifitas pelaksanaan tugas auditor baik internal maupun eksternal, serta menjadi penghubung komunikasi antara dewan komisaris dan auditor eksternal. Teori yang mendasari ini adalah teori stakeholder dan teori keagenan. Dengan terdapatnya komite audit didalam perusahaan ini akan membuat stakeholder (pemegang saham) akan mendapatkan jaminan bahwa kegiatan perusahaan sudah dikendalikan dengan baik dan kegiatan perusahaan baik secara finansial maupun non-finansial telah diungkapkan di dalam laporan keuangan dan tahunan perusahaan. Dari penjelasan diatas, hipotesis penelitian ini adalah:

**H2: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR**

### **2.3.3. Ukuran Dewan Komisaris Mempengaruhi Pengungkapan CSR**

Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal ini, manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002).

Berdasarkan teori agensi, Dewan Komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan manajemen. Semakin besar ukuran Dewan Komisaris, maka komposisi pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh Dewan Komisaris semakin meningkat, sehingga dapat melakukan aktivitas monitoring dengan lebih baik (Akhtaruddin, et. al., 2009). Dengan proses monitoring yang baik, maka diharapkan pengungkapan informasi sosial (CSR) semakin luas, dikarenakan kemungkinan manajer

untuk menyembunyikan informasi dapat dikurangi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

**H3 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR**

#### **2.3.4. Jumlah Rapat Komite Audit Mempengaruhi Pengungkapan CSR**

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit disebutkan bahwa rapat komite paling tidak diadakan sekali dalam tiga bulan. Sebelumnya, dalam keputusan ketua BAPEPAM Nomor Kep- 29/PM/2004 dinyatakan bahwa rapat komite audit paling tidak sama dengan ketentuan minimal rapat umum pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Peraturan tentang jumlah rapat komite audit telah mengalami pembaharuan, hal tersebut dilakukan karena jumlah rapat komite audit berkaitan dengan keefektifan komite audit dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam mengawasi kegiatan perusahaan.

Banyaknya rapat komite audit dalam tahun anggaran menunjukkan bahwa komite audit telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Jumlah rapat komite audit dapat menjadi alat pemantau manajemen sehingga kecurangan dan informasi yang disembunyikan manajemen untuk kepentingannya sendiri dapat diminimalisir.

Hal tersebut dikarenakan semakin sering komite audit mengadakan rapat maka pengawasan terhadap manajemen semakin baik, komunikasi antara audit internal, eksternal dan dewan komisaris semakin baik, perusahaan juga telah menerapkan prinsip GCG dengan baik, dan pengungkapan CSR dalam laporan keuangan dan tahunan juga semakin luas. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

**H4: Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR**

### **2.3.5. Kepemilikan Asing Berpengaruh Terhadap Pengungkapan CSR**

Perusahaan asing memiliki teknologi yang baik dan cukup, memiliki karyawan dengan kualitas yang baik, jaringan informasi yang luas, sehingga memungkinkan untuk melakukan pengungkapan secara luas. Melalui faktor-faktor tersebut, perusahaan asing akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan yang dibentuk oleh para investor asing dalam kegiatan operasional dimana perusahaan anak atau afiliasi didirikan. Banyak negara yang dapat dijadikan sebagai target operasi perusahaan asing, seperti Indonesia. Penetapan CSR dapat diindikasikan akibat dari peningkatan nilai perusahaan setelah menerapkan CSR di dalam operasional perusahaan.

Negara – negara asing dan maju cenderung lebih memperhatikan segala aspek aktivitas yang berhubungan dengan pengungkapan CSR. Sesuai dengan teori stakeholder, semakin kuat dan banyak posisi stakeholder semakin besar upaya yang dilakukan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para stakeholder. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis untuk penelitian ini adalah:

**H5 : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR**

### **2.3.6. Kepemilikan Pemerintah Berpengaruh Terhadap Pengungkapan CSR**

Kepemilikan negara adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah dalam sebuah perusahaan. Menurut Nugroho (2011) di dalam Laksmi dan Kamila (2018) menyatakan bahwa kepemilikan negara yang relevan mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela, diharapkan jumlahnya saham yang dimiliki oleh pemerintah mempengaruhi pengungkapan yang lebih besar, yaitu pengungkapan CSR, karena pemerintah seharusnya mempromosikan transparansi perusahaan publik. Semakin besar kepemilikan saham pemerintah akan mengakibatkan pengungkapan yang lebih besar atas tanggung jawab sosial perusahaan, karena pemerintah harus mempromosikan transparansi di antara

perusahaan publik. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

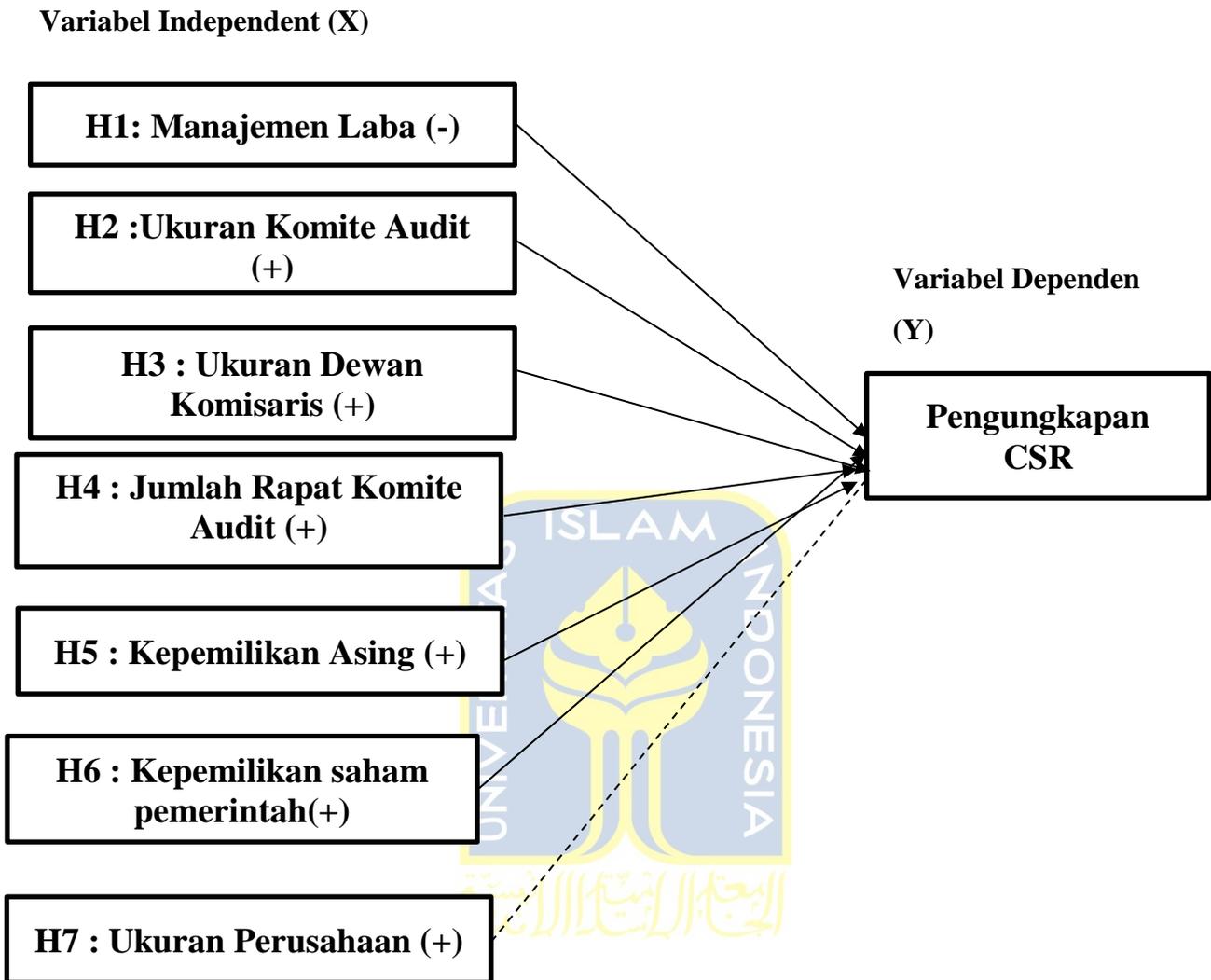
**H6: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR**

### **2.3.7. Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Pengungkapan CSR**

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar memiliki kegiatan operasi yang lebih tinggi, sehingga keberadaannya di dalam masyarakat akan lebih diketahui. Menurut Cho, Roberts dan Patten (2010) di dalam penelitian Waryanto (2010) memaparkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung mengungkapkan informasi CSR yang lebih luas dalam laporan tahunan dari perusahaan yang lebih kecil dikarenakan perusahaan dengan skala besar berupaya untuk meningkatkan pandangan masyarakat mengenai kinerja perusahaan. Menurut didalam penelitian Wardhani dan Muid (2017) dan Waryanto (2010) menjelaskan pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikaitkan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas yang lebih banyak sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat.

Keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan. Disisi lain, perusahaan besar juga memiliki lebih banyak stakeholder yang memperhatikan program sosial yang dilakukan perusahaan. Terkait dengan teori stakeholder maka, perusahaan dengan ukuran perusahaan yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi CSR kepada para stakeholder sebagai alat komunikasi untuk menjaga hubungan baik dan memenuhi harapan stakeholder. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H7: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.**



Gambar 2.2. Model Penelitian

## Bab III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi dan Penentuan Sampel

##### 3.1.1 Populasi

Populasi dari penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Populasi menggunakan perusahaan manufaktur dengan alasan karena perusahaan manufaktur banyak melakukan kegiatan usahanya yang bersinggungan ke masyarakat maka dari itu penulis yakin bahwa perusahaan manufaktur banyak melakukan kegiatan CSR dan perusahaan manufaktur memiliki dampak yang lebih besar pada lingkungan sekitarnya dari pada perusahaan bidang lain seperti perusahaan keuangan atau jasa.

##### 3.1.2 Penentuan Sampel

Sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* metode ini dipilih karena untuk memperoleh sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapaun kriteria yang diinginkan yang digunakan sebagai sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2015-2017
2. Perusahaan yang menerbitkan pelaporan keuangan dan laporan keuangan secara berturut-turut selama tahun 2015-2017
3. Perusahaan yang mengungkapkan *corporate social responsibility*, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan informasi lainnya yang terdapat di dalam pelaporan keuangan dan laporan keuangan tahun periode 2015-2017.

#### 3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data skunder, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui website resminya [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah

dokumen pelaporan keuangan dan laporan keuangan perusahaan tahun 2015-2017 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI).

### 3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen di dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility* (CSR). Untuk variabel independen terdiri atas manajemen laba, ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, kepemilikan asing, kepemilikan saham pemerintah dan terdapat variabel kontrol ukuran perusahaan.

#### 3.3.1 *Corporate Social Responsibility Disclosure*

*Corporate Social Responsibility Disclosure* atau pengungkapan tanggung jawab sosial adalah pengungkapan seluruh aktivitas tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan baik yang berkaitan dengan dampak sosial maupun lingkungan Hadi (2011). Pengungkapan CSR menggunakan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) yang dinyatakan dalam *corporate social responsibility disclosure index* (CSRDI) dan diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Indeks CSR memiliki kategori ekonomi, lingkungan, sosial dan tanggung jawab atas produk. Pengungkapan ini dilakukan dengan memberikan nilai 1 untuk setiap item pengungkapan dan 0 untuk item yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan dan tahunan, kemudian membandingkan total CSR disclosure yang dilaporkan perusahaan dengan jumlah maksimal indikator CSR disclosure. Indikator tersebut adalah indikator *Global Reporting Initiative* (GRI) yang diperoleh dari [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org). Dalam penelitian ini perhitungan CSRDI dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CSRDI} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{91}$$

### 3.3.2 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah jumlah dari seluruh anggota Dewan Komisaris yang terdapat di dalam perusahaan tersebut. Ukuran Dewan Komisaris di hitung dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang terdapat di dalam perusahaan yang disebutkan didalam pelaporan keuangan masing- masing perusahaan (Laksmi dan Kamila 2018).

**DK = JUMLAH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

### 3.3.3 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit

Jumlah rapat komite audit (JKA) adalah banyaknya komite audit mengadakan rapat dalam satu tahun. Pada penelitian ini jumlah rapat komite audit diukur dengan melihat jumlah rapat komite audit yang ada pada laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan komite audit (Istiqomah 2018).

**JKA = JUMLAH RAPAT KOMITE AUDIT**

### 3.3.4 Kepemilikan saham pemerintah

Kepemilikan saham pemerintah merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor pemerintah atau negara. Investor institusional mencakup kepemilikan BUMN dan lembaga pemerintahan lainnya. Kepemilikan Institusional dinyatakan dalam persentase (%) yang diukur dengan cara membandingkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional dibagi dengan total jumlah lembar saham yang beredar (Laksmi dan Kamila 2018).

**KI = JUMLAH % KEPEMILIKAN SAHAM PEMERINTAH**

### 3.3.5 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Besarnya saham diukur dari rasio (%) dari jumlah kepemilikan saham yang dimiliki pihak asing terhadap total saham yang beredar (Laksmi dan Kamila 2018).

$$\text{KAS} = \text{JUMLAH \% KEPEMILIKAN SAHAM ASING}$$

### 3.3.6 Ukuran Komite Audit

Komite audit disini adalah jumlah dari komite audit yang terdapat di dalam sebuah perusahaan. Komite audit diukur dengan mengitung jumlah anggota komite audit yang terdapat didalam pelporan keuangan di suatu perusahaan (Laksmi dan Kamila 2018).

$$\text{KA} = \text{JUMLAH ANGGOTA KOMITE AUDIT}$$

### 3.3.7 Manajemen Laba

Manajemen laba adalah upaya manajerial untuk merekayasa informasi dalam laporan keuangan dengan menggunakan kebebasan memilih kebijakan, metode dan nilai estimasi akuntansi. Dalam penelitian ini manajemen laba diukur dengan menggunakan *discretionary accrual*. *Discretionary accruals* yaitu bentuk kebijakan akrual yang bukan karena kebutuhan dari kondisi perusahaan namun dilakukan oleh manajemen untuk menggeser biaya dan pendapatan dari satu periode ke periode lainnya sehingga tujuan tertentu manajemen dapat terpenuhi, sedangkan *non-discretionary accruals* adalah komponen akrual diluar kebijakan manajemen atau merupakan pengakuan laba akrual yang wajar yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Jones yang telah dimodifikasi. Model Modified Jones (1991) digunakan karena dianggap sebagai model yang paling tepat bila dibandingkan dengan model-model

manajemen laba. Langkah-langkah perhitungan *discretionary accrual* adalah sebagai berikut :

- Menghitung total akrual dengan menggunakan pendekatan aliran kas (*cash flow approach*) yaitu :

$$\mathbf{TAC = NI - CFO}$$

Dimana :

TAC : Total akrual

NI : Laba bersih kas dari aktivitas operasi

CFO : Aliran kas dari aktivitas operasional

- Mencari nilai koefisien dari regresi total akrual :

Untuk mencari nilai  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ , dan  $\beta_3$  dilakukan dengan teknik regresi. Hasil regresi ini merupakan langkah awal untuk menentukan *nondiscretionary accrual* (NDAC)

$$\mathbf{TAC/TA_{it-1} = \beta_1(1/TA_{it-1}) + \beta_2((\Delta REV - \Delta REC)/TA_{it-1}) + \beta_3(PPE/TA_{it-1}) + e}$$

Dimana :

TAC : Total akrual perusahaan

$\beta_1 - \beta_3$  : Koefisien

$TA_{it-1}$  : Total aset perusahaan pada akhir tahun t-1

$\Delta REV$  : Perubahan laba perusahaan (t – t-1)

$\Delta REC$  : Perubahan piutang bersih (*net receivable*) Perusahaan (t – t-1)

PPE : *Property, plant and equipment* perusahaan

e : Error item

- Menentukan *nondiscretionary accrual*

Setelah diketahui koefisien dari hasil regresi, kemudian koefisien digunakan untuk memprediksi *nondiscretionary accrual* (NDAC) melalui persamaan berikut :

Dimana :

$$\mathbf{NDAC = \beta_1(1/TA_{it-1}) + \beta_2((\Delta REV - \Delta REC)/TA_{it-1}) + \beta_3(PPE/TA_{it-1}) + e}$$

Dimana :

NDAC : *Nondiscretionary accrual*

$\beta_1 - \beta_3$  : Koefisien

TAit-1 : Total aset perusahaan pada akhir tahun

$\Delta REV$  : Perubahan pendapatan perusahaan (t – t-1)

$\Delta REC$  : Perubahan piutang bersih (*net recivable*) perusahaan (t-t-1)

PPE : *Property, plant and equipment* perusahaan

e : Error item

➤ Menentukan *discretionary accrual*

Setelah diketahui nilai nondiscretionary accrual (NDAC), kemudian menghitung discretionary accrual (DAC) dengan mengurangi total akrual (hasil perhitungan (1) dibagi total aset tahun lalu dengan *nondiscretionary accrual* (hasil perhitungan (2)).

$$DAC = (TAC / TA_{it-1}) - NDAC$$

Dimana :

DAC : *Discretionary accrual*

TAC : Total akrual

TAit-1 : Total aset perusahaan pada akhir tahun t-1

NDAC : *Nondiscretionary accrual*

Menurut Sulistyanto (2008) bahwa secara empiris nilai *Discretionary Accruals* dapat bernilai nol, positif, atau negatif. Nilai nol menunjukkan manajemen laba yang dilakukan dengan pola perataan laba (*income smoothing*). Sedangkan nilai positif menunjukkan adanya manajemen laba dengan pola peningkatan laba (*income increasing*) dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba yang dilakukan dengan pola penurunan laba (*income decreasing*).

### **3.4. Variabel Kontrol**

#### **3.4.1. Ukuran Perusahaan**

Ukuran Perusahaan merupakan skala untuk menentukan besar kecilnya perusahaan diukur menggunakan total asset yang dimiliki oleh perusahaan.

**Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aktiva)**

### **3.5. Metode Analisa Data**

#### **3.5.1. Statistik deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi dari variabel penelitian yaitu manajemen laba, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, kepemilikan asing, kepemilikan saham pemerintah, ukuran perusahaan dan *corporate social responsibility disclosure*. Deskripsi variabel penelitian ini diketahui melalui rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi sebagai pengukurannya.

#### **3.5.2. Uji asumsi klasik**

Pengujian asumsi klasik merupakan uji yang dilakukan agar mengetahui kelayakan model regresi yang akan dilakukan terhadap penelitian. Uji asumsi klasik dilakukan sebelum analisis regresi untuk menghindari penyimpangan asumsi klasik agar tidak terjadi kesalahan dalam hasil penelitian. Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang berdistribusi normal dan bebas dari multikolonieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

##### **3.5.2.1. Uji normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat data variabel penelitian yang digunakan dalam model regresi merupakan residual yang berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas didalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau uji K-S. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 5%

atau 0,05. Apabila hasil pengujian lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data residual yang digunakan tidak berdistribusi normal, namun bila hasil pengujian lebih besar dari 0,05 maka data residual yang digunakan berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

### **3.5.2.2. Uji multikolonieritas**

Menurut Ghozali (2011) uji multikolonieritas merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi yang digunakan terdapat korelasi antara variabel bebas. Sebuah model regresi dikatakan baik bila memiliki variabel independen yang tidak berkorelasi. Semakin rendah tingkat korelasi antar variabel maka model tersebut dikatakan sebagai model yang baik.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya yaitu variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen mana yang dipengaruhi variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang tidak dipengaruhi oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena  $VIF = 1/tolerance$ . Ukuran umum yang digunakan untuk menilai ada atau tidaknya multikolonieritas adalah nilai tolerance  $\leq 0,10$  atau  $VIF \geq 10$  dengan tingkat kolonieritas 0.95, apabila nilai tolerance lebih kecil 0,01 atau VIF lebih besar 10 maka model regresi tersebut terdapat multikolonieritas dan apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terdapat multikolonieritas (Ghozali, 2011).

### **3.5.2.3. Uji heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut

homoskedastisitas dan jika tidak tetap disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas adalah scatterplot uji grafik dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Apabila titik-titik dalam grafik tidak menyebar dan membentuk pola teratur seperti gelombang atau melebar kemudian menyempit maka dapat mengindikasikan adanya heteroskedastisitas, namun apabila titik-titik dalam grafik tersebut menyebar dan tidak ada pola yang jelas maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

### 3.5.3. Analisis regresi berganda

Menurut Ghozali (2011) analisis regresi digunakan untuk menentukan masing-masing koefisien variabel independen yang kemudian untuk menentukan apakah hipotesis penelitian ditolak atau diterima.

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan model regresi dimana seluruh variabel dimasukkan dalam uji penelitian untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut merupakan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini :

$$\text{CSRI} = \beta_0 + \beta_1 \text{MLB} + \beta_2 \text{UKA} + \beta_3 \text{UDK} + \beta_4 \text{JRKA} + \beta_5 \text{KPA} + \beta_6 \text{KPI} + \beta_7 \text{UP} + e$$

Dimana :

CSRDI : *Corporate social responsibility index*

$\beta_0$  : Konstanta

$\beta_1 + \beta_7$  : Koefisien

MLB : Manajemen laba

UKA : Ukuran komite audit

UDK : Ukuran dewan komisaris

JRKA : Jumlah rapat komite audit

KPA	: Kepemilikan asing
KPI	: Kepemilikan saham pemerintah
UP	: Ukuran perusahaan
e	: Error item

### 3.5.4. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian menggunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan uji signifikansi parameter individual (uj statistic t).

#### 3.5.4.1. Koefisien determinan $R^2$

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Secara umum, nilai koefisien determinasi terletak diantara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Nilai  $R^2$  yang kecil atau mendekati 0 menunjukkan bahwa variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen memiliki kemampuan yang terbatas. Nilai  $R^2$  yang mendekati 1 menunjukkan bahwa hampir semua variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian merupakan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Ghozali (2011).

#### 3.5.4.2. Uji statistik t

Menurut Ghozali (2011) menyatakan bahwa pengujian hipotesis, uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa signifikan variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t pada masing-masing variabel. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Hasil output regresi pada SPSS kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi. Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

1. Jika probabilitas  $\leq 0,05$ , maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Proses Sampel Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesia Stock Exchange (IDX) jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 diketahui bahwa terdapat 165 perusahaan. Dari jumlah tersebut, hanya 40 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang telah ditetapkan. Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling*, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tabel penentuan sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah perusahaan manufaktur di BEI tahun 2015-2017	165
Tidak rutin menerbitkan laporan keuangan 2015-2017	(103)
Tidak memiliki data yang lengkap terkait variabel penelitian	(22)
Jumlah data yang digunakan sebagai Sampel	40

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, terdapat 40 perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian. Daftar nama 40 perusahaan tersebut terdapat di lampiran I. Selanjutnya data variabel independent dan dependent atas sampel tersebut diolah menggunakan program IBM SPSS versi 23.

#### 4.2. Hasil Penelitian

##### 4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini menjelaskan data yang dapat dilihat dari standar deviasi, Rata-rata (mean), sum, range, maksimum dan minimum, serta kemencengan distribusi. Hasil dari perhitungan indeks CSR, terhadap kinerja perusahaan untuk seluruh perusahaan pada periode 2015-2017 dan menggunakan SPSS versi 23, sebagai berikut:

Tabel : 4.2 Hasil Statistik Deskriptif

<b>Descriptive Statistics</b>					
	n	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
CSRDI	120	,08	,33	,1824	,07112
Manajemen_La ba	120	-,35	,38	,0494	,08533
Ukuran_Komit	120	2,00	5,00	3,1083	,44525
Ukuran_Dewan _Komisaris	120	2,00	12,00	4,6250	2,20032
Jumlah_Rapat_ Komite_Audit	120	2,00	28,00	7,5750	5,54684
Kepemilikan_A sing	120	,00	,95	,2902	,33888
Kepemilikan_P emerintah	120	,00	,90	,0635	,17171
Ukuran_Perusa haan	120	25,22	35,69	29,0372	2,21920
Valid N (listwise)	120				

Sumber : Data skunder diolah dengan SPSS versi 23 (2019)

### 1. *Corporate Social Responsibility Disclosure Index*

Pada variabel pengungkapan CSR, semakin besar nilai variabel CSRDI, artinya perusahaan lebih banyak melakukan pengungkapan item CSR. Nilai yang terkecil adalah 0,08 dan nilai yang terbesar adalah 0,33 dengan nilai rata-rata sebesar 0,1824. Hal ini berarti bahwa perusahaan paling sedikit mengungkapkan CSR yang sesuai dengan pedoman GRI sebesar 8% dan paling banyak mengungkapkan sesuai dengan pedoman GRI adalah 33%. Rata-rata pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan adalah 18,24%

sesuai dengan pedoman GRI. Standar deviasi sebesar 0,07112 menunjukkan variasi yang terdapat dalam indeks. Untuk indeks secara spesifik di lihat dari beberapa aspek terdapat 4 aspek, aspek pertama ekonomi menunjukkan nilai terkecil 0,11 atau 11% dan untuk nilai terbesar 0,44 atau 44% untuk rata-rata aspek ekonomi 0,23 atau 23%, aspek yang kedua adalah lingkungan menunjukkan nilai terkecil 0,00 atau 0% dan untuk nilai terbesar 0,44 atau 44% untuk rata-rata aspek lingkungan 0,157 atau 15,7%, aspek yang ketiga adalah sosial menunjukkan nilai terkecil 0,05 atau 5% dan untuk nilai terbesar 0,41 atau 41% untuk rata-rata aspek sosial 0,135 atau 13,5%, aspek yang terakhir tanggung jawab produk menunjukkan nilai terkecil 0,00 atau 0% dan untuk nilai terbesar 0,56 atau 56% untuk rata-rata aspek tanggung jawab produk 0,1528 atau 15,28%. Besarnya indeks menunjukkan besarnya pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan.

## 2. Manajemen Laba

Nilai minimal dari manajemen laba sebesar -0,35, sedangkan nilai maksimum manajemen laba sebesar 0,38. Nilai rata-rata dari manajemen laba sebesar 0,0494 atau 4,94%. Standar deviasi sebesar 0,08533, berarti ukuran dari sebaran data dari manajemen laba sebesar 0,08533 dari 120 perusahaan yang diteliti

## 3. Ukuran Komite Audit

Pada variabel Ukuran Komite Audit, nilai yang terkecil adalah 2, dan nilai terbesar adalah 5 dengan nilai rata-rata sebesar 3,1 . Hal ini berarti jumlah Komite Audit yang dimiliki perusahaan sampel paling sedikit 2 orang dan paling banyak memiliki anggota Komite Audit 5 orang dan rata-rata tiap perusahaan sampel memiliki Komite Audit sebanyak 3,1 orang. Standar deviasi sebesar 0,44525 menunjukkan variasi yang terdapat dalam variabel Ukuran Komite Audit.

#### **4. Ukuran Dewan Komisaris**

Pada variabel ukuran Dewan Komisaris yang terkecil adalah 2 dan yang terbesar adalah 12. Hal ini berarti jumlah Dewan Komisaris yang dimiliki suatu perusahaan paling sedikit berjumlah 2 orang dan paling banyak jumlah Dewan Komisaris perusahaan berjumlah 12 orang. Nilai rata-rata ukuran Dewan Komisaris sebesar 4,62 berarti rata-rata jumlah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan sampel adalah 4,62 orang. Standar deviasi sebesar 2,20032 menunjukkan variasi yang terdapat dalam ukuran Dewan Komisaris.

#### **5. Jumlah Rapat Komite Audit**

Pada variabel Jumlah rapat Komite Audit, Semakin besar nilainya berarti frekuensi Komite Audit melakukan rapat internal semakin sering. Nilai yang terkecil variabel ini adalah 2, dan nilai yang terbesar adalah 28 dengan nilai rata-rata sebesar 7,5. Hal ini berarti Komite Audit perusahaan sampel paling sedikit melakukan rapat sebanyak 2 kali dan paling sering adalah 28 kali dengan rata-rata rapat yang dilakukan Komite Audit sebanyak 7,5 kali. Standar deviasi sebesar 5,54684 menunjukkan variasi yang terdapat dalam variabel Jumlah rapat Komite Audit.

#### **6. Kepemilikan Asing**

Pada variabel kepemilikan saham Asing, nilai yang terkecil adalah 0,00 persen dan nilai yang terbesar adalah 95 persen dengan nilai rata-rata sebesar 29 persen. Hal ini berarti saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing paling banyak adalah 95% dan paling rendah adalah 0% atau tidak dimiliki oleh pihak asing sama sekali. Rata-rata saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing sebesar 29% Standar deviasi sebesar 0,333 menunjukkan variasi yang terdapat dalam kepemilikan saham Asing.

#### **7. Kepemilikan Pemerintah**

Pada variabel kepemilikan saham insitusi pemerintah , nilai yang terkecil adalah 0,00 persen dan nilai yang terbesar adalah 90 %

dengan nilai rata-rata sebesar 6,35%. Hal ini berarti saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi pemerintah paling banyak adalah 90% dan paling rendah adalah 0% atau tidak dimiliki oleh pihak institusi sama sekali. Rata-rata saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi sebesar 6,35% dan Standar deviasi sebesar 0,17171 menunjukkan variasi yang terdapat dalam kepemilikan saham insitusi pemerintah.

## **8. Ukuran Perusahaan**

Pada variabel ukuran perusahaan (size), semakin besar nilainya, artinya perusahaan tersebut semakin besar karena mempunyai jumlah asset (log Aset) yang lebih banyak. Nilai yang terkecil adalah 25,22 dan nilai yang terbesar adalah 35,69 dengan nilai rata-rata sebesar 29,0372. Hal ini berarti jumlah log Aset yang dimiliki oleh perusahaan paling kecil adalah 25,22 dan log Aset yang dimiliki oleh perusahaan paling besar adalah 35,69 perusahaan. Standar deviasi sebesar 2,21920 menunjukkan variasi yang terdapat dalam ukuran perusahaan.

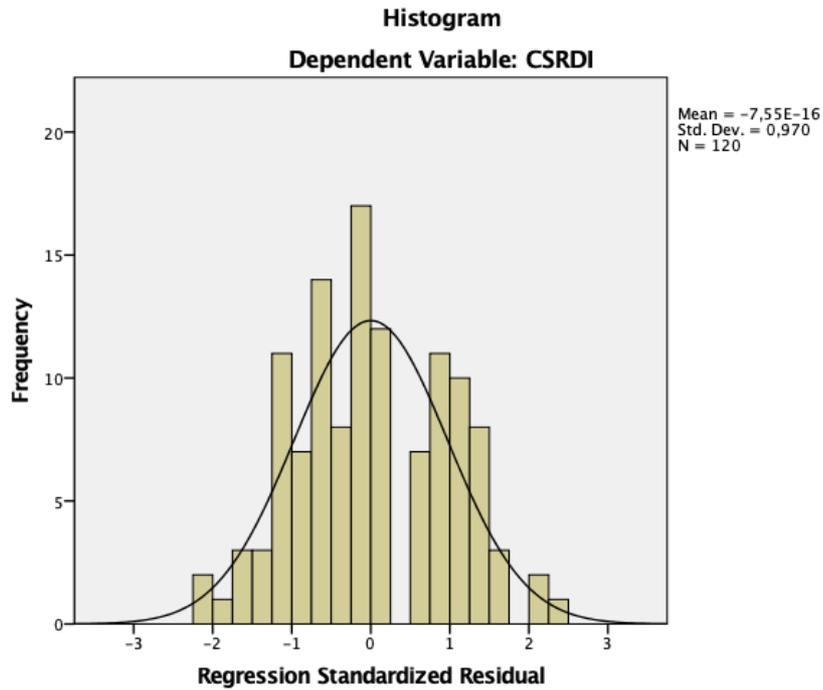
### **4.1.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan agar mengetahui apakah data variabel penelitian yang digunakan dalam model regresi merupakan data residual yang berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (1-sample K-S) dengan nilai  $\alpha$  sebesar 0,05. Apabila nilai signifikansi data residual lebih kecil dari  $\alpha$  berarti data terdistribusi tidak normal, jika kita nilai signifikansi data residual lebih besar dari  $\alpha$  maka artinya data tersebut terdistribusi secara normal (Ghozali, 2011). Berdasarkan uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau

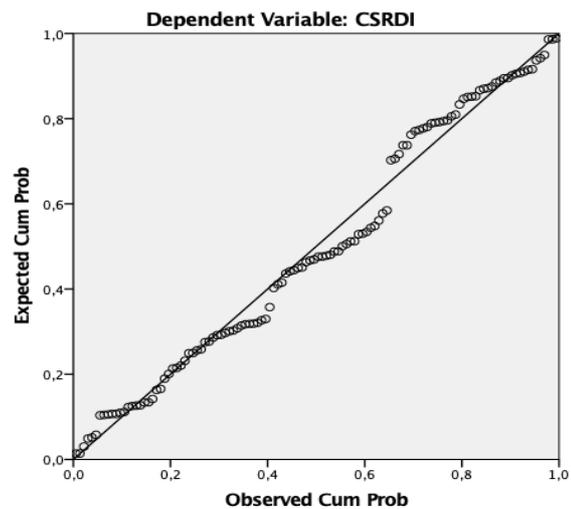
memenuhi asumsi normalitas. Hal ini didukung dengan tampilan grafik histogram yang menunjukkan pola distribusi normal. Hasil uji normalitas dapat di lihat di bawah ini:

Gambar 4.1 Grafik Histogram



الجامعة الإسلامية

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data skunder diolah dengan SPSS versi 23 (2019)

**Tabel 4.2 Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,05625665
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,075
	Negative	-,078
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,072 <sup>c</sup>

Sumber : Data skunder diolah dengan SPSS versi 23 (2019)

Dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov di atas, Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,072. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data residual dalam model regresi terdistribusi normal, karena nilai Asymp.Sig. (2-tailed) > 0,05, dan model regresi tersebut layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

**2. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi yang digunakan terdapat korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabelnya. Multikolonieritas dalam penelitian ini menggunakan nilai tolerance dan Variance Inflation Faktor (VIF). Apabila nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 artinya tidak terdapat gejala multikolonieritas (Ghozali, 2011). Hasil uji multikolonieritas

dapat dilihat pada tabel 4.3 Uji multikolonieritas di bawah ini :

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,150	,085		1,769	,080		
Manajemen_Laba	-,024	,065	-,029	-,378	,706	,926	1,080
Ukuran_Komit	-,017	,016	-,106	1,083	,281	,579	1,727
Ukuran_Dewan_Komisaris	,003	,003	,106	1,053	,295	,556	1,800
Jumlah_Rapat_Komite_Audit	,000	,001	,030	,303	,763	,554	1,806
Kepemilikan_Asing	,001	,018	,003	,035	,972	,784	1,275
Kepemilikan_Pemerintah	,170	,035	,409	4,851	,000	,784	1,276
Ukuran_Perusahaan	,012	,003	,383	3,988	,000	,605	1,652

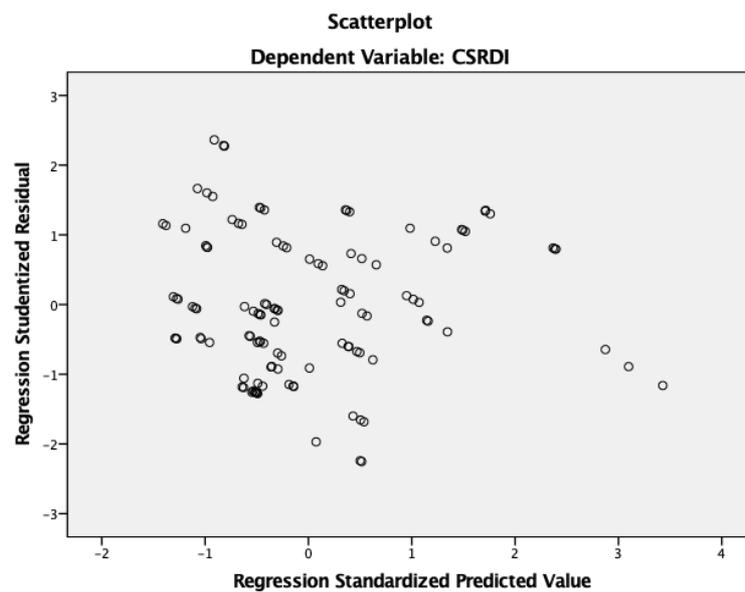
a. Dependent Variable: CSRDI

Sumber : Data skunder diolah dengan SPSS versi 23 (2019)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, nilai tolerance setiap variabel independen tidak ada yang menunjukkan nilai kurang dari 0,10 dan nilai VIF pada tiap variabel independen tidak menunjukkan nilai yang lebih dari 10. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan yang lain. Pengujian ini menggunakan uji grafik scatterplot, apabila titik pada grafik menyebar dan tidak ada pola yang jelas maka tidak terjadi heteroskedastisitas, namun apabila titik pada grafik membentuk pola tertentu maka bisa diindikasikan adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.2 di bawah ini :



Sumber : Data skunder diolah dengan SPSS versi 23 (2019)

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, grafik scatterplot menunjukkan titik- titik menyebar secara acak baik di bawah maupun di atas angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola teratur. Hal ini terlihat bahwa tidak ada indikasi adanya heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis berikutnya.

#### 4.1.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu manajemen laba, ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, rapat komite audit, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, kepemilikan insitisional terhadap variabel dependen, yaitu *corporate social responsibility disclosure*. Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini :

**Tabel 4.4 (Analisis Regresi Linier Berganda)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,150	,085		-1,769	,080
Manajemen_Laba	-,024	,065	-,029	-,378	,706
Ukuran_Komite	-,017	,016	-,106	-1,083	,281
Ukuran_Dewan_Komisaris	,003	,003	,106	1,053	,295
Jumlah_Rapat_Komite_Audit	,000	,001	,030	,303	,763
Kepemilikan_Asing	,001	,018	,003	,035	,972
Kepemilikan_Pemerintah	,170	,035	,409	4,851	,000
Ukuran_Perusahaan	,012	,003	,383	3,988	,000

a. Dependent Variable: CSRDI

Sumber : Data skunder diolah dengan SPSS versi 23 (2019)

Dari hasil regresi linear berganda di atas, maka model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{CSRDI} = -0,150 - 0,024\text{MLB} - 0,17 \text{UKA} + 0,003 \text{UDK} + 0,000 \text{JRKA} \\ + 0,001\text{KPA} + 0,170 \text{KPI} + 0,12 \text{UP}$$

Keterangan :

CSRDI : *Corporate socialresponsibility disclosure index*

MLB : Manajemen laba

UKA : Ukuran komite audit

UDK : Ukuran dewan komisaris

JRKA : Jumlah rapat komite audit

KPA : Kepemilikan asing

KPI : Kepemilikan saham pemerintah

UP : Ukuran perusahaan

Dari persamaan regresi berganda di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar -0,150 memiliki arti bahwa bila seluruh variabel independen bernilai 0, maka besarnya variabel dependen atau *corporate social responsibility (CSR)* bernilai sebesar -0,150
2. Variabel manajemen laba memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,024. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan bahwa jika manajemen laba naik 1% maka CSR yang terdapat di dalam pelaporan keuangan perusahaan mengalami penurunan sebesar 2,4% dengan asumsi variabel independent konstan.
3. Variabel Ukuran komite audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,17. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan bahwa jika ukuran komite audit mengalami peningkatan 1% maka CSR yang terdapat di dalam pelaporan keuangan perusahaan mengalami penurunan sebesar 0,17% dengan asumsi variabel independent konstan.
4. Variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,003. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan bahwa

jika ukuran dewan komisaris mengalami peningkatan 1% maka CSR yang terdapat di dalam pelaporan keuangan perusahaan mengalami peningkatan sebesar 0,3% dengan asumsi variabel independent konstan.

5. Variabel jumlah rapat komite audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,001. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan bahwa jika jumlah rapat komite audit mengalami peningkatan 1% maka CSR yang terdapat di dalam pelaporan keuangan perusahaan mengalami penurunan sebesar 0,1% dengan asumsi variabel independent konstan.
6. Variabel kepemilikan asing memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,001. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan bahwa jika kepemilikan asing mengalami peningkatan 1% maka CSR yang terdapat di dalam pelaporan keuangan perusahaan mengalami peningkatan sebesar 0,1% dengan asumsi variabel independent konstan.
7. Variabel kepemilikan saham pemerintah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,170. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan bahwa jika kepemilikan saham pemerintah mengalami peningkatan 1% maka CSR yang terdapat di dalam pelaporan keuangan perusahaan mengalami peningkatan sebesar 17% dengan asumsi variabel independent konstan.
8. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,12. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan bahwa jika ukuran perusahaan mengalami peningkatan 1% maka CSR yang terdapat di dalam pelaporan keuangan perusahaan mengalami peningkatan sebesar 12% dengan asumsi variabel independent konstan.

### 4.3. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t)

#### 4.3.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak diantara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang mendekati 0 menunjukkan bahwa variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen memiliki kemampuan yang terbatas dan bila nilai  $R^2$  mendekati 1 menunjukkan bahwa hampir semua variabel independen dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Hasil perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.6 di bawah ini.

**Tabel 4.5 (Koefisien Determinasi ( $R^2$ ))**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,612 <sup>a</sup>	,374	,335	,05799

Sumber : Data skunder diolah dengan SPSS versi 23 (2019)

Dari hasil analisis koefisien determinasi di atas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,335. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu manajemen laba, ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat komite audit ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan kepemilikan saham pemerintah ini dapat menjelaskan variasi variabel dependen yaitu CSR disclosure sebesar 33,5%. Sedangkan sisanya sebesar 66,5%

dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

#### 4.2.2. Uji statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa signifikan variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Hasil uji signifikansi parameter individual dapat dilihat dalam tabel 4.6 di bawah ini:

**Tabel 4.7 Uji statistik t**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-,150	,085		-1,769	,080
	Manajemen_Laba	-,024	,065	-,029	-,378	,706
	Ukuran_Komit	-,017	,016	-,106	-1,083	,281
	Ukuran_Dewan_Komisaris	,003	,003	,106	1,053	,295
	Jumlah_Rapat_Komite_Audit	,000	,001	,030	,303	,763
	Kepemilikan_Asing	,001	,018	,003	,035	,972
	Kepemilikan_Pemerintah	,170	,035	,409	4,851	,000
	Ukuran_Perusahaan	,012	,003	,383	3,988	,000

a. Dependent Variable: CSRDI

Berdasarkan tabel 4.6 Hasil uji signifikansi parameter individual di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa Manajemen Laba berpengaruh negatif terhadap *corporate*

*social reponsibility disclosure*. Berdasarkan tabel 4.6 nilai koefisien regresi manajemen laba sebesar -0,024 dan nilai signifikansi sebesar 0,706. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan, karena signifikansi  $0,706 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *corporate social reponsibility disclosure*. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) dalam penelitian tidak terima.

## 2. Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *corporate social reponsibility disclosure*. Berdasarkan tabel 4.6 nilai koefisien regresi ukuran dewan komisaris sebesar -0,017 dan nilai signifikansi sebesar 0,281 Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ , maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan, dikarenakan signifikansi  $0,281 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *corporate social reponsibility disclosure*. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini tidak diterima.

## 3. Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *corporate social reponsibility disclosure*. Berdasarkan tabel 4.6 nilai koefisien regresi ukuran dewan komisaris sebesar 0,003 dan nilai signifikansi sebesar 0,295 Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan, dikarenakan signifikansi  $0,295 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *corporate social reponsibility*

*disclosure*. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini tidak diterima.

#### **4. Pengujian Hipotesis 4**

Hipotesis keempat penelitian ini menguji pengaruh positif jumlah rapat komite audit terhadap *corporate social reponsibility disclosure*. Berdasarkan tabel 4.7 nilai koefisien regresi jumlah rapat komite audit sebesar 0,000 dan nilai signifikansi sebesar 0,763 pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ , maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan, dikarenakan signifikansi  $0,763 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *corporate social reponsibility disclosure*. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini tidak diterima.

#### **5. Pengujian Hipotesis 5**

Hipotesis keenam penelitian ini menguji pengaruh positif kepemilikan asing terhadap *corporate social reponsibility disclosure*. Berdasarkan tabel 4.7 nilai koefisien regresi kepemilikan asing sebesar 0,001 dan nilai signifikansi sebesar 0,972 Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ , maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan, dikarenakan signifikansi  $0,972 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *corporate social reponsibility disclosure*. Dengan demikian hipotesis keenam (H5) dalam penelitian ini tidak diterima.

#### **6. Pengujian Hipotesis 6**

Hipotesis ketujuh penelitian ini menguji pengaruh positif kepemilikan saham pemerintah terhadap *corporate social reponsibility disclosure*. Berdasarkan tabel 4.7 nilai koefisien regresi kepemilikan saham pemerintah sebesar

0,170 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ , maka koefisien regresi tersebut signifikan, dikarenakan signifikansi  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham pemerintah berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Dengan demikian hipotesis ketujuh (H6) dalam penelitian ini di terima.

## 7. Pengujian Hipotesis 7

Hipotesis kelima penelitian ini menguji pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Berdasarkan tabel 4.7 nilai koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 0,012 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ , maka koefisien regresi tersebut signifikan, dikarenakan signifikansi  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Dengan demikian hipotesis kelima (H7) dalam penelitian ini di terima.

## 4.3. Pembahasan

### 4.3.1 Pengaruh manajemen laba terhadap *corporate social responsibility*

Hasil hipotesis ini menunjukan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap CSR, maka hipotesis pertama di tolak. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang di lakukan oleh, Laksmi dan Kamila (2018), Istiqomah (2018), dan Zulaikha (2014) yang menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Hal ini mungkin disebabkan karena perusahaan lebih memilih membuat pengungkapan CSR dibanding manipulasi laba. Disamping itu, *corporate social responsibility* dapat memberikan dampak yang positif bagi reputasi sebuah

perusahaan. Karena kegiatan CSR pada sebuah perusahaan akan meningkatkan citranya di mata stakeholders, dengan meningkatnya citra perusahaan ini akan memudahkan pihak manajemen untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari pihak stakeholders tanpa perlu melakukan tindakan oportunistis seperti praktik manajemen laba.

#### **4.3.2 Pengaruh ukuran komite audit terhadap *corporate social reponsibility***

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap CSR, maka hipotesis kedua ini ditolak. Peraturan Bapepam nomor IX.I.5 tentang rata-rata Ukuran Komite Audit perusahaan adalah 3 orang, sedangkan mean sampel penelitian ini nilainya 3 yang artinya bahwa sebagian besar perusahaan sampel memiliki jumlah anggota Komite Audit yang sama yaitu 3 (tiga) orang. Dengan demikian, ukuran Komite Audit dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap mekanisme pengawasan dan pengungkapan CSR dimungkinkan karena jumlah anggota Komite Audit perusahaan diangkat sebagai formalitas untuk memenuhi peraturan Bapepam nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit. Disamping itu, mungkin terdapat faktor lain seperti kurangnya pengawasan auditor dan rendahnya pemahaman auditor dalam pengawasi perusahaan tersebut. Hasil tersebut juga di dukung oleh Priantana dan Yustian (2011) dan Waryanto (2010).

#### **4.3.3. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *corporate social reponsibility***

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap CSR. Hasil tersebut juga didukung oleh, Laksmi dan Kamila (2018) dan Waryanto (2010).

UU No. 40 tahun 2007 menyebutkan bahwa Perseroan yang kegiatan usaha berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, ukuran Dewan Komisaris dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dimungkinkan karena Dewan Komisaris perusahaan diangkat lebih sebagai formalitas untuk memenuhi ketentuan UU No. 40 tahun 2007. Akibatnya pembentukan Dewan Komisaris tidak memperhatikan komposisi, kemampuan, dan integritas anggota, sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan, pengendalian kurang mampu memberikan arahan kepada manajemen. Hal ini mengakibatkan besar kecilnya Ukuran Dewan Komisaris tidak dapat menjamin adanya mekanisme pengawasan yang lebih baik, karena bukan merupakan faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan.

#### 4.3.4. **Pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap *corporate social***

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap CSR. Hal ini dapat disimpulkan bahwa berapapun frekuensi rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, tidak akan mempengaruhi luas pengungkapan CSR yang disajikan dalam laporan tahunan. Sebab efektifitas fungsi Komite Audit tidak hanya memperhatikan ukuran dan jumlah pertemuan komite audit saja, tetapi juga kualitas dan kompetensi anggota Komite Audit.

Hasil ini juga di dukung oleh Waryanto (2010) menyatakan bahwa tingkat frekuensi atau jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Audit tidak dapat menjamin bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan kecurangan

akan berjalan secara efektif. Sehingga peluang manajemen untuk melakukan kecurangan dengan menyembunyikan informasi masih dapat dimungkinkan.

#### **4.3.5. Pengaruh kepemilikan asing terhadap *corporate social responsibility***

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap CSR. Hasil ini konsisten dengan penelitian Laksmi dan Kamila (2018), Hu, Zhu dan Hu (2016) dan Waryanto (2010). Hal ini disebabkan karena kepemilikan oleh pihak asing tidak mampu menjadikan proses monitoring menjadi lebih baik, sehingga informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen tidak diberikan secara menyeluruh kepada pemilik demi tujuan tertentu.

Menurut Waryanto (2010), alasan lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan hal tersebut adalah bahwa kemungkinan kepemilikan asing pada perusahaan di Indonesia secara umum belum memperdulikan masalah lingkungan dan sosial sebagai isu kritis yang harus secara ekstensif untuk diungkapkan dalam laporan tahunan. Disamping itu, jika kepemilikan asing dikonsolidasikan dengan perusahaan induk di negara asal maka kemungkinan persentase kepemilikan tersebut sangat kecil, sehingga mereka menjadi kurang memperhatikan pengungkapan CSR sebagai suatu hal yang penting untuk diungkapkan kepada publik.

#### **4.3.6. Pengaruh kepemilikan saham pemerintah terhadap *corporate social responsibility***

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap CSR. Hasil

hipotesis ini juga sejalan dengan penelitian Laksmi dan Kamila (2018), Hu, Zhu dan Hu (2016). Hal ini berarti, semakin banyak saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak pemerintah, maka institusi mempunyai kemampuan untuk melakukan intervensi terhadap jalannya perusahaan dan mengatur proses penyusunan laporan keuangan. Dan kepemilikan instusional pemerintah patuh akan hukum yang mengatur Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, ini lah yang membuat jika perusahaan tersebut dimiliki insitusi pemerintah memiliki pengungkapan yang lebih lengkap.

#### **4.3.7. Pengaruh ukuran Perusahaan terhadap *corporate social responsibility***

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap CSR. Hasil hipotesis ini juga sejalan dengan penelitian Wardani dan Muid (2017), dan Waryanto (2010) yang menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Perusahaan yang lebih besar mempunyai aktivitas operasi yang lebih banyak dan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat, serta mungkin akan memiliki pemegang saham yang lebih banyak yang akan selalu memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan karakteristik penyampelan yang telah ditetapkan penelitian memperoleh sampel 40 perusahaan manufaktur atau 120 data yang memenuhi syarat untuk diteliti.

Model regresi berganda telah memenuhi seluruh uji asumsi klasik dengan model regresinya adalah :  $CSRDI = - 0,150 - 0,024MLB - 0,17 UKA + 0,003 UDK + 0,000 JRKA + 0,001KPA + 0,170 KPI + 0,12 UP$ ; dengan nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 37,4%.

2. Berdasarkan model regresi maka didapatkan pengaruh variabel Manajemen Laba (MLB), Ukuran Komite Audit (UKA), Ukuran Dewan Komisaris (UDK), Jumlah Rapat Komite Audit (JRKA), Kepemilikan Perudahaan Asing (KPA), Kepemilikan Pemerintah (KPI) dan Ukuran Perusahaan (UP) terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai berikut:

1. Manajemen laba **tidak berpengaruh** terhadap luasnya pengungkapan *corporate social responsibility* pada laporan tahunan perusahaan manufaktur di Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan karena perusahaan lebih memilih membuat pengungkapan CSR dibanding manajemen laba untuk menaikkan nilai perusahaan.
2. Ukuran komite audit **tidak berpengaruh** terhadap luasnya pengungkapan *corporate social responsibility* pada laporan tahunan perusahaan manufaktur di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena jumlah anggota Komite Audit perusahaan diangkat sebagai formalitas untuk memenuhi peraturan Bapepam

nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit. Disamping itu, mungkin terdapat faktor lain seperti kurangnya pengawasan auditor dan rendahnya pemahaman auditor dalam pengawasan perusahaan tersebut.

3. Ukuran dewan komisaris **tidak berpengaruh** terhadap luasnya pengungkapan *corporate social responsibility* pada laporan tahunan perusahaan manufaktur di Indonesia. Dewan Komisaris perusahaan diangkat lebih sebagai formalitas untuk memenuhi ketentuan UU No. 40 tahun 2007. Akibatnya besar kecilnya Ukuran Dewan Komisaris tidak dapat menjamin adanya mekanisme pengawasan yang lebih baik, karena bukan merupakan faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan.
4. Jumlah rapat komite audit **tidak berpengaruh** terhadap luasnya pengungkapan *corporate social responsibility* pada laporan tahunan perusahaan manufaktur di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas fungsi Komite Audit tidak hanya dilihat dari ukuran dan jumlah pertemuan komite audit saja, tetapi lebih dipengaruhi atas kualitas dan kompetensi anggota Komite Audit.
5. Kepemilikan asing **tidak berpengaruh** terhadap luasnya pengungkapan *corporate social responsibility* pada laporan tahunan perusahaan manufaktur di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kepemilikan oleh pihak asing tidak mampu menjadikan proses monitoring menjadi lebih baik, sehingga informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen tidak diberikan secara menyeluruh kepada pemilik demi tujuan tertentu.
6. Kepemilikan saham pemerintah **berpengaruh positif dan signifikan** terhadap luasnya pengungkapan *corporate social responsibility* pada laporan tahunan perusahaan manufaktur di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham

pemerintah di suatu perusahaan mendorong perusahaan lebih patuh kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas sehingga mempengaruhi luasnya pengungkapan CSR.

7. Ukuran perusahaan **berpengaruh positif dan signifikan** terhadap luasnya pengungkapan *corporate social responsibility* pada laporan tahunan perusahaan manufaktur di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat, sehingga akan mempengaruhi luasnya pengungkapan CSR.

## 5.2. Keterbatasan

Penelitian yang dilakukan penulis tidak dapat terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang masih memerlukan pengembangan serta perbaikan pada penelitian yang mungkin dilakukan berikutnya. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Masih banyak variabel yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian ini mungkin tidak hanya variabel non keuangan tetapi keuangan juga.
2. Periode pengamatan terbatas hanya tiga tahun saja, sehingga mungkin tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai praktik dan pengungkapan CSR.
3. Terdapat unsur subjektivitas dalam mengungkapkan penilaian *corporate social responsibility*
4. Penelitian ini hanya terfokus pada perusahaan manufaktur saja, sehingga mungkin tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai praktik dan pengungkapan CSR.
5. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinan, Adjusted  $R^2$  pada penelitian ini hanya sebesar 37,4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tersapat variabel-variabel lain yang dapat

mempengaruhi pengungkapan CSR dan variabel independent pada penelitian ini tidak dapat sepenuhnya mempengaruhi pengungkapan CSR.

### 5.3. Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Untuk para investor ataupun calon investor yang akan menanamkan modalnya dalam perusahaan, baiknya mempertimbangkan implementasi serta pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukan oleh perusahaan.
2. Pemerintah hendaknya menetapkan regulasi yang secara tegas dan bukan hanya membuat peraturan saja tapi harus jelas mengatur praktik dan pengungkapan, serta pengawasan CSR pada perusahaan di Indonesia sehingga praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia semakin meningkat.
3. Masyarakat semestinya menilai mana perusahaan yang baik dan mana yang tidak, salah satunya dengan cara melihat kepedulian yang diberikan oleh perusahaan terhadap lingkungan masyarakat dan lingkungan alam yang ada disekitar perusahaan.
4. Bagi penelitian selanjutnya:
  - a. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas periode pengamatan agar dapat melihat kondisi pengungkapan CSR di Indonesia.
  - b. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan beberapa variabel tambahan seperti variabel keuangan dan non keuangan.
  - c. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel yang di ambil, tidak hanya perusahaan manufaktur saja.

- d. Penelitian selanjutnya dalam melakukan pengukuran pada *corporate social responsibility* sebaiknya diperhitungkan dengan cara dipecah berdasarkan item-item dalam CSR.
- e. Rendahnya *Adjusted R<sup>2</sup>* dari model yang di uji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, sehingga penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lainnya juga di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.



## Daftar Pustaka

- Akhtarudin, Mohamed., Monirul Alam Hossain., Mahmud Hossain., & Lee Yao. (2009). *Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms*. JAMAR. Vol. 7, November.
- Bowen, H. (1953). *Social Responsibility Of The Businessman*. New York : Harper & Row.
- Donaldson, & Preston. (1995). *The Stakeholder Theory Of The Corporation*. *Academy Of Management Review*, 20:65-91.
- Dowling. (1975). *Oraganizational Legetimacy Social Value And Organizational Behavior*. *Pasific Sociological Review*, 122-136.
- Dowling. (1975). *Oraganizational Legetimacy Social Value And Organizational Behavior*. *Pasific Sociological Review*, 122-136.
- Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI). 2002. *Peranan Dewan Komisaris dan Komte Audit dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan (corporate governance)*. Jakarta
- Frederick, W. (1960). *The Growing Concern Over Businnes Responsibility*. *California Management Review* , 2, 54-61.
- Gudono. (2017). *Teori Organisasi*. Yogyakarta: C.V Andi.
- Gray, R.H. Owen, D & Adam, C. (1996). *Accoounting and Accountanbility*. Hemel Hempstead: Prentics Hall
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19.5thed*. Semarang : Badan Penerbit Univesitas Diponogoro.
- GRI. (2017). *Global Reporting Initiative*. Diperoleh 5 September 2018, dari [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)
- Hadi, Noor. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Healy, & Wahlen. (1999). *A Review Of The Earnings Management Literature And Its Implications For Standar Setting*. *Accounting Horizons*, 13(4), 365-383.
- Ismail, Solihin. (2009). *Corporate Social Responsibility : From Charity To Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.

- Istiqomah, E. (2018). *Pengaruh Manajemen Laba Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure*. Skripsi S1 UII.
- Jensen, Michael., & William H. Meckling. (1976). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*. North Holland Publishing Company *Jurnal Of Financial Economics*. No 3. pp305-360
- Laksmi, A. C., & Kamila, Z. (2018). *The Effect Of Good Corporate Governance And Earnings Management To Corporate Social Responsibility Disclosure*. *Academy Of Accounting And Financial Studies Journal*. Vol. 22. No. 1. pp.1-16
- Mardikanto, Totok. (2014). *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*. Bandung : Alfabeta.
- Otoritas Jasa Keuangan (2016), *Nomor 29 /POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik*. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan (2015), *Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit*. Jakarta.
- O' Donovan, G. (2002). *Environmental Discloser In The Annual Report: Extending The Applicability And Predictive Power Of Legitimacy Theory*. *Accounting, Auditing & Accountanility Journal*. Vol. 15. No. 3. pp. 344-371.
- Priantana, & Yustian. (2011). *The Influence Of Good Corporate Governance Structure to wards Corporate Social Responsibility Disclosure In Financial Companies Listed In The Indonesian Stock Exchange*. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 4(1), 65-78.
- Pemerintah Republik Indonesia (2007), *UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta.
- Rosmasita, H. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta*. Skripsi S1 UII.
- Susilo, M. S., & Midawati, T. (2015). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility*. *Jurnal Ilmu Utama*, Sidharta. (2007). *Evaluasi infrastruktur pendukung pelaporan tanggung*

- Jawab sosial dan lingkungan di Indonesia*. Pidato ilmiah pengukuhan guru besar FEUI. Jakarta & Riset Akuntansi 4 (5), 1-16.
- Wardani, R. A., & Muid, D. (2017). *Pengaruh Agresivitas Pajak, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Corporate Social Responsibility*. Diponegoro Journal Of Accounting, 1-10.
- Waryanto. (2010). *The Infuence Of Good Corporate Governance Characteristics Towards Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure Scope In Indonesia*. Unpublished undergraduate thesis. Universitas Diponegoro.
- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). (2000). *WBCSD's first report-Corporate social Responsibility*. Geneva.
- Zulaikha. (2014). *Pengaruh Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan terhadap Corporate Social Reporting*. Jurnal Akuntansi & Auditing , 181-94.
- Zhu, Y., & Hu. Y. (2016). *Does ownership type matter for corporate social responsibility disclosure: Evidence from China*. Global Conference on Business and Finance Proceedings, 11(1), 183-197  
Retrieved December 8, 2018, <http://eprints.uwe.ac.uk/28570/3/ISSN1941-9589-V11-N1-2016%20183-197.pdf>

## LAMPIRAN

Tabel kode perusahaan

NO	KODE	Nama Perusahaan
1	ADES	PT Akasha Wira International Tbk
2	AKPI	Argha Kerya Prima Industry Tbk
3	ALDO	Alkindo Naratama Tbk
4	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk
5	ASII	Astra International Tbk
6	AUTO	Astra Otoparts Tbk
7	BIMA	Primariondo Asia Infrastructure Tbk
8	BTON	Beton Jaya Manunggal Tbk
9	CPIN	Chareon Pokphand Indonesia Tbk
10	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk
11	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk
12	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
13	EKAD	Ekadharna International Tbk
14	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk
15	FPNI	Lotte Chemical Titan Tbk
16	GDYR	Goodyear Indonesia Tbk
17	GGRM	Gudang Garam Tbk
18	HMSP	Handjaya Mandala Sampoerna Tbk
19	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
20	IGAR	Champion Pasific Indonesia Tbk
21	IMAS	Indomobil Sukses International Tbk
22	INAF	Indofarma (Persero) Tbk
23	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
24	INDS	Indospring Tbk
25	JECC	Jembo Cable Company Tbk
26	KBRI	Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk
27	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk
28	KLBF	Kalbe Farma Tbk
29	LMSH	Lionmesh Prima Tbk
30	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
31	MYOR	PT Mayora Indah Tbk
32	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk
33	ROTI	PT Nippon Indosari Corporinda Tbk
34	SIDO	Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk
35	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
36	SMSM	Selamat Sampurna Tbk
37	SRSN	Indo Acitama Tbk
38	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk
39	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
40	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk

## Lampiran II

### Indikator aspek CSRDI

Indikator berdasarkan Aspek						Indikator berdasarkan Aspek					
<b>KATEGORI: EKONOMI</b>						<b>KATEGORI: LINGKUNGAN</b> <span style="float: right;">OECD/UNGC</span>					
Kinerja Ekonomi <span style="float: right;">OECD</span>						Produk dan Jasa					
G4-EC1	G4-EC2	G4-EC3	G4-EC4			G4-EN27	G4-EN28				
Keberadaan di Pasar						Kepatuhan					
G4-EC5	G4-EC6					G4-EN29					
Dampak Ekonomi Tidak Langsung						Transportasi					
G4-EC7	G4-EC8					G4-EN30					
Praktik Pengadaan						Lain-lain					
G4-EC9						G4-EN31					
<b>KATEGORI: LINGKUNGAN</b> <span style="float: right;">OECD/UNGC</span>						Asesmen Pemasok atas Lingkungan					
Bahan						Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan					
G4-EN1	G4-EN2					G4-EN32	G4-EN33				
Energi						KATEGORI: SOSIAL					
G4-EN3	G4-EN4	G4-EN5	G4-EN6	G4-EN7		<b>PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA</b> <span style="float: right;">OECD/UNGC</span>					
Air						Kepegawaian					
G4-EN8	G4-EN9	G4-EN10				G4-LA1	G4-LA2	G4-LA3			
Keanekaragaman Hayati						Hubungan Industrial <span style="float: right;">UNGC</span>					
G4-EN11	G4-EN12	G4-EN13	G4-EN14			G4-LA4					
Emisi						Kesehatan dan Keselamatan Kerja <span style="float: right;">OECD</span>					
G4-EN15	G4-EN16	G4-EN17	G4-EN18	G4-EN19		G4-LA5	G4-LA6	G4-LA7	G4-LA8		
						Pelatihan dan Pendidikan <span style="float: right;">OECD</span>					
G4-EN20	G4-EN21					G4-LA9	G4-LA10	G4-LA11			
Efluen dan Limbah						Keberagaman dan Kesenjangan Peluang					
G4-EN22	G4-EN23	G4-EN24	G4-EN25	G4-EN26		G4-LA12					
						Kesenjangan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki					
						G4-LA13					

Indikator berdasarkan Aspek	Indikator berdasarkan Aspek
<b>PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA</b> <span style="float: right;">OECD/UNGC</span>	<b>MASYARAKAT</b>
Asesmen Pemasok terkait Praktik Ketenagakerjaan	Masyarakat Lokal <span style="float: right;">OECD/UNGC</span>
G4-LA14 G4-LA15	G4-SO1 G4-SO2
Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan <span style="float: right;">OECD</span>	Anti-korupsi <span style="float: right;">OECD/UNGC</span>
G4-LA16	G4-SO3 G4-SO4 G4-SO5
<b>HAK ASASI MANUSIA</b> <span style="float: right;">OECD/UNGC</span>	Kebijakan Publik <span style="float: right;">OECD/UNGC</span>
Investasi	G4-SO6
G4-HR1 G4-HR2	Anti Persaingan <span style="float: right;">OECD</span>
Non-diskriminasi <span style="float: right;">OECD/UNGC</span>	G4-SO7
G4-HR3	Kepatuhan <span style="float: right;">OECD</span>
Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama <span style="float: right;">OECD/UNGC</span>	G4-SO8
G4-HR4	Asesmen Pemasok atas Dampak terhadap Masyarakat <span style="float: right;">OECD</span>
Pekerja Anak <span style="float: right;">OECD/UNGC</span>	G4-SO9 G4-SO10
G4-HR5	Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat <span style="float: right;">OECD</span>
Pekerja Paksa atau Wajib Kerja <span style="float: right;">OECD/UNGC</span>	G4-SO11
G4-HR6	<b>TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK</b> <span style="float: right;">OECD</span>
Praktik Pengamanan	Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan <span style="float: right;">OECD</span>
G4-HR7	G4-PR1 G4-PR2
Hak Adat	Pelabelan Produk dan Jasa
G4-HR8	G4-PR3 G4-PR4 G4-PR5
Asesmen	Komunikasi Pemasaran
G4-HR9	G4-PR6 G4-PR7
Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia	Privasi Pelanggan
G4-HR10 G4-HR11	G4-PR8
Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	Kepatuhan
G4-HR12	G4-PR9

### Lampiran III

Tabel CSRDI 2015

NO	Kode GRI	ITEM CSR BERDASARKAN GRI	ADES	AKPI	ALDO	AMFG	ASII	AUTO	BIMA	BTON	CPIN	DLTA	DPNS	DVLA	EKAD	FASW	FPNI	GDYR
1	EC 1	Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	EC 2	Impikasi finansial dan risiko akibat perubahan iklim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	EC 3	Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	EC 4	Bantuan finansial dari pemerintah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	EC 5	Standard upah minimum	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
6	EC 6	Rasio pemasok lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7	EC 7	Rasio karyawan lokal	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	EC 8	Pengaruh pembangunan Infrastruktur	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	EC 9	Dampak pengaruh ekonomi tidak langsung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	EN 1	Pemakaian material atau bahan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	EN 2	Pemakaian material daur ulang	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	EN 3	Pemakaian energi langsung	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
13	EN 4	Pemakaian energi tidak langsung	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
14	EN 5	Intensitas energi	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
15	EN 6	Pengurangan konsumsi energi	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
16	EN 7	Pengurangan konsumsi energi dibidang produk dan jasa	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	EN 8	Total pengembalian air berdasarkan sumber	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	EN 9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
19	EN 10	Jumlah air yang di daur ulang	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EN 11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	EN 12	Perlindungan keanekaragaman hayati	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	EN 13	Pemulihan habitat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
23	EN 14	Strategi menjaga keanekaragaman hayati	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
24	EN 15	Spesies yang dilindungi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	EN 16	Total emisi gas rumah kaca	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	EN 17	Total gas tidak langsung yang berhubungan dengan gas rumah kaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	EN 18	Insentif pengurangan gas rumah kaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	EN 19	Pengurangan emisi ozon	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
29	EN 20	Jenis-jenis emisi udara	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
30	EN 21	Kualitas pembuangan air dan lokasinya	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	EN 22	Klasifikasi limbah dan pembuangan	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32	EN 23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	EN 24	Jumlah dan volume total tumpah signifikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34	EN 25	Bobot limbah yang diangkut	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
35	EN 26	Keanekaragaman hayati	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	EN 27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37	EN 28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasikan menurut ka	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	EN 29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena k	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	EN 30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain ser	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
40	EN 31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
41	EN 32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
42	EN 33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
43	EN 34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
44	LA 1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan m	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
45	LA 2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan b	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
46	LA 3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
47	LA 4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, ter	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
48	LA 5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal ma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
49	LA 6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran,	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
50	LA 7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	LA 8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercapai dalam perjanjian formal den	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
52	LA 9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	LA 10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
54	LA 11	Persentase karyawan yang menerima revaluasi kinerja dan pengembangan karier	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
55	LA 12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
56	LA 13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
57	LA 14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagake	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
58	LA 15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenag	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
59	LA 16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani,	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
60	HR 1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan y	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
61	HR 2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi r	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	HR 3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HR 4	Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
64	HR 5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
65	HR 6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
66	HR 7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
67	HR 8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat d	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
68	HR 9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan revaluasi atau asesmen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
69	HR 10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	HR 11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manu	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
71	HR 12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
72	SO 1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	SO 2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
74	SO 3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait deng	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
75	SO 4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
76	SO 5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
77	SO 6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima man	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
78	SO 7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti-persaingan, anti-trust, serta praktik	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
79	SO 8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter ata	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
80	SO 9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap r	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
81	SO 10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dal	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
82	SO 11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
83	PR 1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhad	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	PR 2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode sukarela ter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
85	PR 3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi ter	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
86	PR 4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode sukarela ter	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
87	PR 5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
88	PR 6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
89	PR 7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode sukarela ter	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
90	PR 8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
91	PR 9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-un	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JUMLAH PENGUNGKAPAN	25	21	17	26	20	22	17	12	11	15	12					





Tabel CSRDI 2016

NO	Kode GRI	ITEM CSR BERDASARKAN GRI	ADES	AKPI	ALDO	AMFG	ASII	AUTO	BIMA	BTON	CPN	DLTA	DPNS	DVLA	EKAD	FASW
1	EC 1	Nilai ekonomi yang dihasilkan dan distribusikan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	EC 2	Impikasi finansial dan risiko akibat perubahan iklim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	EC 3	Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	EC 4	Bantuan finansial dari pemerintah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	EC 5	Standard upah minimum	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
6	EC 6	Rasio pemasok lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	EC 7	Rasio karyawan lokal	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	EC 8	Pengaruh pembangunan Infrastruktur	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
9	EC 9	Dampak pengaruh ekonomi tidak langsung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	EN 1	Pemakaian material atau bahan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	EN 2	Pemakaian material daur ulang	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	EN 3	Pemakaian energi langsung	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
13	EN 4	Pemakaian energi tidak langsung	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
14	EN 5	Intensitas energi	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
15	EN 6	Pengurangan konsumsi energi	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
16	EN 7	Pengurangan konsumsi energi dibidang produk dan jasa	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	EN 8	Total pengembalian air berdasarkan sumber	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
18	EN 9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
19	EN 10	jumlah air yang di daur ulang	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EN 11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	EN 12	Perlindungan keanekaragaman hayati	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22	EN 13	Pemulihan habitat	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
23	EN 14	Strategi menjaga keanekaragaman hayati	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
24	EN 15	Spesies yang dilindungi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	EN 16	Total emisi gas rumah kaca	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	EN 17	Total gas tidak langsung yang berhubungan dengan gas rumah kaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	EN 18	Insentif pengurangan gas rumah kaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	EN 19	Pengurangan emisi ozon	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	EN 20	Jenis-jenis emisi udara	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
30	EN 21	Kualitas pembersihan air dan lokasinya	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	EN 22	Klasifikasi limbah dan pembuangan	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	EN 23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
33	EN 24	Jumlah dan volume total tumpah signifikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	EN 25	Bobot limbah yang diangkut	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
35	EN 26	Keanekaragaman hayati	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
36	EN 27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
37	EN 28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut ka	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	EN 29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena k	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
39	EN 30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain ser	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40	EN 31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
41	EN 32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
42	EN 33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
43	EN 34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
44	JA 1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan m	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
45	JA 2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan b	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
46	JA 3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
47	JA 4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, ter	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
48	JA 5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal ma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
49	JA 6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran,	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
50	JA 7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
51	JA 8	Topik kesehatan dan keselamatan yang terungkap dalam perjanjian formal den	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
52	JA 9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	JA 10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
54	JA 11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
55	JA 12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
56	JA 13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	JA 14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagake	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
58	JA 15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenag	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
59	JA 16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani,	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
60	HR 1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan y	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	HR 2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi r	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
62	HR 3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HR 4	Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko ti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	HR 5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
65	HR 6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	HR 7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
67	HR 8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat d	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
68	HR 9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
69	HR 10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70	HR 11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manu	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
71	HR 12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan,	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
72	SO 1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	SO 2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
74	SO 3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait deng	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
75	SO 4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
76	SO 5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
77	SO 6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima man	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
78	SO 7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti-persaingan, anti-trust, serta praktik	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1
79	SO 8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter ata	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
80	SO 9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap n	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
81	SO 10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dal	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0
82	SO 11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
83	PR 1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhad	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
84	PR 2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode sukarela ter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
85	PR 3	Jenis informasi produk dan jasa yang dihapuskan oleh prosedur organisasi ter	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
86	PR 4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode sukarela ter	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
87	PR 5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1
88	PR 6	Penjualan produk yang ditarik atau disengketakan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
89	PR 7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode sukarela ten	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
90	PR 8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
91	PR 9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JUMLAH PENGUNGKAPAN	25	21	17	26	20	22	17	12	11	15	12	15	10	20
			0,27472527	0,23076923	0,18681319	0,28571429	0,21578022	0,24175824	0,18681319	0,13186813	0,12087912	0,16483516	0,13186813	0,16483516	0,10989011	0,21978022





Tabel CSRDI 2017

NO	Kode GRI	ITEM CSR BERDASARKAN GRI	ADES	AMPI	ALDO	AMFG	ASII	AUTO	BIMA	BTON	CPIN	DLTA	DPNS	DWLA	EKAD
1	EC 1	Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	EC 2	Impikasi finansial dan risiko akibat perubahan iklim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	EC 3	Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	EC 4	Bantuan finansial dari pemerintah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	EC 5	Standard upah minimum	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0
6	EC 6	Rasio pemasok lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	EC 7	Rasio karyawan lokal	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	EC 8	Pengaruh pembangunan Infrastruktur	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
9	EC 9	Dampak pengaruh ekonomi tidak langsung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	EN 1	Pemakaian material atau bahan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	EN 2	Pemakaian material daur ulang	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	EN 3	Pemakaian energi langsung	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
13	EN 4	Pemakaian energi tidak langsung	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
14	EN 5	Intensitas energi	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0
15	EN 6	Pengurangan konsumsi energi	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
16	EN 7	Pengurangan konsumsi energi dibidang produk dan jasa	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	EN 8	Total pengembalian air berdasarkan sumber	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
18	EN 9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
19	EN 10	Jumlah air yang di daur ulang	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
20	EN 11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	EN 12	Perlindungan keanekaragaman hayati	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
22	EN 13	Pemulihan habitat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
23	EN 14	Strategi menjaga keanekaragaman hayati	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
24	EN 15	Spesies yang dilindungi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	EN 16	Total emisi gas rumah kaca	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26	EN 17	Total gas tidak langsung yang berhungan dengan gas rumah kaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	EN 18	Insentif pengurangan gas rumah kaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	EN 19	Pengurangan emisi ozon	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
29	EN 20	Jenis-jenis emisi udara	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
30	EN 21	Kualitas pembuangan air dan lokasinya	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	EN 22	Klasifikasi limbah dan pembuangan	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	EN 23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
33	EN 24	Jumlah dan volume total tumpah signifikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	EN 25	Bobot limbah yang diangkat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
35	EN 26	Keanekaragaman hayati	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
36	EN 27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
37	EN 28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut ka	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	EN 29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena k	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
39	EN 30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain ser	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
40	EN 31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
41	EN 32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
42	EN 33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
43	EN 34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
44	LA 1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan m	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
45	LA 2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan b	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
46	LA 3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
47	LA 4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, tera	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
48	LA 5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal ma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
49	LA 6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran.	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
50	LA 7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
51	LA 8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal den	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
52	LA 9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	LA 10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
54	LA 11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
55	LA 12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
56	LA 13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	LA 14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagake	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
58	LA 15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenag	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
59	LA 16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani,	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
60	HR 1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan y	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
61	HR 2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi r	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
62	HR 3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HR 4	Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko ti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	HR 5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
65	HR 6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	HR 7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
67	HR 8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adu d	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
68	HR 9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
69	HR 10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
70	HR 11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi man	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
71	HR 12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
72	SO 1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
73	SO 2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
74	SO 3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait deng	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
75	SO 4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
76	SO 5	Insiden korupsi yang terbuka dan tindakan yang diambil	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
77	SO 6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima man	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
78	SO 7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
79	SO 8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter ata	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
80	SO 9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap n	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
81	SO 10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dal	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
82	SO 11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
83	PR 1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhad	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
84	PR 2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela ter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
85	PR 3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terk	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
86	PR 4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela ter	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
87	PR 5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0
88	PR 6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
89	PR 7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela ter	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
90	PR 8	Jumlah total keluhan yang terbuka terkait dengan pelanggaran privasi pelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
91	PR 9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-un	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH PENGUNGKAPAN			25	21	17	26	20	22	17	12	11	15	12	15	10

0,27472527 0,23076923 0,18681319 0,28571429 0,21978022 0,24175824 0,18681319 0,13186813 0,12087912 0,16483516 0,13186813 0,16483516 0,10989011





Lampiran IV

Tabel Manajemen Laba

No	KODE	TAHUN	TACCIT/A(T-1)	1/A(T-1)	REVIT/A(T-1)	PPEIT/A(T-1)	NDAC	DAC
1	ADES	2015	0,0135	0,0005	0,0035	0,5654	0,5694	0,4306
		2016	-0,0968	0,0005	0,0354	0,5728	0,6087	-0,6087
		2017	-0,0638	0,0005	-0,0231	0,6231	0,6005	-0,6005
2	AKPI	2015	0,0352	0,0005	-0,0031	1,1746	1,1720	0,8280
		2016	-0,1152	0,0005	0,0086	0,5627	0,5718	-0,5718
		2017	-0,0005	0,0005	-0,0149	0,6071	0,5927	-0,5927
3	ALDO	2015	0,0490	0,0005	0,0085	0,3296	0,3386	2,6614
		2016	-0,0356	0,0005	0,0031	0,3036	0,3072	-0,3072
		2017	0,0398	0,0005	0,0093	0,3597	0,3695	-0,3695
4	AMFG	2015	-0,0065	0,0005	-0,0311	0,4619	0,4313	3,5687
		2016	-0,0170	0,0005	-0,0189	0,8244	0,8059	-0,8059
		2017	-0,0473	0,0005	-0,0403	0,7391	0,6993	-0,6993
5	ASII	2015	-0,0266	0,0005	-0,0276	0,1767	0,1496	4,8504
		2016	-0,0298	0,0005	0,0110	0,1762	0,1876	-0,1876
		2017	-0,0340	0,0005	0,0186	0,1848	0,2039	-0,2039
6	AUTO	2015	-0,0379	0,0005	-0,0439	0,2438	0,2004	5,7996
		2016	-0,0402	0,0005	0,0440	0,2510	0,2956	-0,2956
		2017	0,0105	0,0005	0,0044	0,2414	0,2463	-0,2463
7	BIMA	2015	-0,3756	0,0005	-0,1059	0,1238	0,0184	6,9816
		2016	0,0031	0,0005	0,3078	0,1142	0,4224	-0,4224
		2017	0,0666	0,0005	-0,2061	0,1194	-0,0862	0,0862
8	BTON	2015	0,0244	0,0005	-0,0070	0,0756	0,0691	7,9309
		2016	-0,0228	0,0005	-0,0672	0,0649	-0,0018	0,0018
		2017	0,0303	0,0005	0,0978	0,0621	0,1604	-0,1604
9	CPIN	2015	0,1542	0,0005	0,0042	0,5426	0,5473	8,4527
		2016	0,0105	0,0005	0,0159	0,4715	0,4715	-0,4715
		2017	0,0864	0,0005	0,0112	0,4548	0,4665	-0,4665
10	DLTA	2015	-0,0547	0,0005	-0,0967	0,1056	0,0094	9,9906
		2016	-0,0051	0,0005	0,0602	0,0927	0,1534	-0,1534
		2017	-0,0521	0,0005	0,0211	0,0751	0,0967	-0,0967
11	DPNS	2015	-0,0250	0,0005	-0,0174	0,0458	0,0290	10,9710
		2016	0,0067	0,0005	0,0005	0,0435	0,0445	-0,0445
		2017	0,0390	0,0005	-0,0137	0,0372	0,0240	-0,0240
12	DVLA	2015	-0,0704	0,0005	0,0212	0,2081	0,2298	11,7702
		2016	0,0117	0,0005	0,0321	0,2940	0,3266	-0,3266
		2017	-0,0070	0,0005	0,0066	0,2586	0,2657	-0,2657
13	EKAD	2015	-0,0726	0,0005	0,0147	0,2346	0,2498	12,7502
		2016	0,0892	0,0005	0,1120	0,1049	0,1029	-1,0229
		2017	0,0711	0,0005	-0,0206	0,5194	0,4992	-0,4992
14	FASW	2015	-0,0853	0,0005	-0,0717	0,8809	0,8096	13,1904
		2016	-0,1974	0,0005	0,1554	0,8968	1,0527	-1,0527
		2017	-0,0603	0,0005	-0,0212	0,7497	0,7290	-0,7290
15	FPNI	2015	0,1310	0,0005	0,0381	0,5096	0,5481	14,4519
		2016	0,0033	0,0005	-0,0037	0,4448	0,4416	-0,4416
		2017	-0,0147	0,0005	-0,0020	0,4709	0,4694	-0,4694
16	GDYR	2015	-0,0108	0,0005	-0,0231	0,5552	0,5326	15,4674
		2016	-0,0497	0,0005	0,0144	0,4852	0,5001	-0,5001
		2017	-0,1552	0,0005	-0,0227	0,5274	0,5052	-0,5052
17	GGRM	2015	0,0558	0,0005	0,0175	0,3453	0,3633	16,6367
		2016	0,0042	0,0005	0,0949	0,3228	0,4182	-0,4182
		2017	-0,0071	0,0005	0,0172	0,3401	0,3578	-0,3578
18	HMSP	2015	0,3366	0,0005	0,0064	0,2246	0,2315	17,7685
		2016	-0,0346	0,0005	0,0631	0,1838	0,2475	-0,2475
		2017	-0,0637	0,0005	-0,0022	0,1621	0,1604	-0,1604
19	ICBP	2015	-0,0225	0,0005	0,0022	0,2619	0,2764	18,7236
		2016	-0,0359	0,0005	0,0267	0,2679	0,2950	-0,2950
		2017	-0,0564	0,0005	-0,0030	0,2810	0,2784	-0,2784
20	IGAR	2015	-0,0817	0,0005	-0,0107	0,1896	0,1795	19,8205
		2016	0,0146	0,0005	0,0466	0,1839	0,2310	-0,2310
		2017	-0,0358	0,0005	0,0070	0,1966	0,2041	-0,2041
21	IMAS	2015	-0,0348	0,0005	0,0139	0,1957	0,1980	20,8040
		2016	-0,0174	0,0005	-0,0117	0,1555	0,1443	-0,1443
		2017	0,0210	0,0005	0,0147	0,1810	0,1962	-0,1962
22	INAF	2015	-0,1022	0,0005	0,0041	0,3188	0,3234	21,6766
		2016	0,1960	0,0005	-0,0156	0,2776	0,2625	-0,2625
		2017	-0,1400	0,0005	-0,0461	0,3527	0,3071	-0,3071
23	INDF	2015	-0,0059	0,0005	0,0216	0,2744	0,2744	22,7256
		2016	-0,0208	0,0005	0,0170	0,2799	0,2973	-0,2973
		2017	-0,0166	0,0005	-0,0015	0,3625	0,3615	-0,3615
24	INDS	2015	-0,0488	0,0005	-0,0565	0,6496	0,5936	23,4064
		2016	-0,0563	0,0005	0,0186	0,5330	0,5521	-0,5521
		2017	-0,0834	0,0005	0,0259	0,5001	0,5264	-0,5264
25	JECC	2015	-0,0179	0,0005	0,0201	0,3127	0,3127	24,6423
		2016	-0,0382	0,0005	0,0957	0,3009	0,3970	-0,3970
		2017	-0,0016	0,0005	-0,0309	0,3576	0,3272	-0,3272
26	KBRI	2015	-0,0348	0,0005	-0,1071	0,8772	0,7706	25,2294
		2016	-0,1321	0,0005	0,0364	0,7573	0,7942	-0,7942
		2017	-0,1167	0,0005	-0,0182	0,8409	0,8233	-0,8233
27	KDSI	2015	0,0558	0,0005	0,0201	0,4219	0,4219	26,6263
		2016	-0,0326	0,0005	0,0303	0,3294	0,3602	-0,3602
		2017	0,1140	0,0005	0,0191	0,3856	0,4052	-0,4052
28	KLBK	2015	-0,0297	0,0005	-0,0052	0,3166	0,3119	27,6881
		2016	0,0139	0,0005	0,0214	0,3326	0,3545	-0,3545
		2017	0,0292	0,0005	0,0067	0,3509	0,3581	-0,3581
29	LMSH	2015	0,0636	0,0005	0,0401	0,1971	0,1575	28,8425
		2016	-0,0046	0,0005	0,0559	0,4627	0,5191	-0,5191
		2017	-0,0149	0,0005	0,0495	0,3430	0,3931	-0,3931
30	MLBI	2015	-0,1893	0,0005	-0,1336	0,5675	0,4344	29,5656
		2016	-0,1268	0,0005	0,2310	0,6083	0,8398	-0,8398
		2017	-0,0042	0,0005	0,1494	0,5996	0,7495	-0,7495
31	MYOR	2015	-0,1055	0,0005	0,0816	0,3662	0,4483	30,5517
		2016	0,0643	0,0005	0,0084	0,3403	0,3492	-0,3492
		2017	0,0275	0,0005	0,0174	0,3087	0,3265	-0,3265
32	RICY	2015	-0,1022	0,0005	-0,0014	0,2885	0,2875	31,7125
		2016	-0,0571	0,0005	0,0005	0,2775	0,2785	-0,2785
		2017	-0,1523	0,0005	0,0020	0,2508	0,2532	-0,2532
33	ROTI	2015	-0,1340	0,0005	0,0382	0,8500	0,8887	32,1113
		2016	-0,0499	0,0005	0,0034	0,6809	0,6848	-0,6848
		2017	-0,0806	0,0005	-0,0495	0,6828	0,6339	-0,6339
34	SIDO	2015	0,0016	0,0005	0,0071	0,3411	0,3486	33,6514
		2016	0,0056	0,0005	0,0154	0,3760	0,3919	-0,3919
		2017	-0,0358	0,0005	0,0178	0,4067	0,4251	-0,4251
35	SMGR	2015	-0,0805	0,0005	-0,0304	0,7331	0,7032	34,2968
		2016	-0,0169	0,0005	0,0003	0,8085	0,8092	-0,8092
		2017	-0,0159	0,0005	-0,0563	0,7354	0,6795	-0,6795
36	SMSM	2015	-0,0402	0,0005	0,0205	0,2803	0,3013	35,6987
		2016	-0,0363	0,0005	0,0293	0,2220	0,2518	-0,2518
		2017	0,0485	0,0005	0,0371	0,3171	0,3419	-0,3419
37	SRSN	2015	0,1991	0,0005	0,0023	0,2711	0,739	36,7261
		2016	0,0191	0,0005	-0,0077	0,3833	0,3761	-0,3761
		2017	-0,0951	0,0005	0,0093	0,2953	0,3050	-0,3050
38	TOTO	2015	0,0220	0,0005	-0,0052	0,4243	0,4197	37,5803
		2016	-0,0563	0,0005	-0,0478	0,3614	0,3441	-0,3441
		2017	-0,0523	0,0005	0,0428	0,3124	0,3526	-0,3526
39	UNVR	2015	-0,0313	0,0005	-0,0052	0,5827	0,5779	38,4221
		2016	-0,0187	0,0005	0,0343	0,6058	0,6406	-0,6406
		2017	-0,0033	0,0005	0,0367	0,6224	0,6595	-0,6595
40	WIIM	2015	0,1034	0,0005	0,0141	0,2489	0,2635	39,7365
		2016	-0,0017	0,0005	-0,0185	0,2461	0,2281	-0,2281
		2017	-0,1111	0,0005	-0,0485	0,2311	0,1831	-0,1831

## Lampiran V

Tabel Ukuran komite audit

NO	KODE	2015	2016	2017
1	ADES	3	3	3
2	AKPI	3	3	3
3	ALDO	3	3	3
4	AMFG	4	4	4
5	ASII	4	4	4
6	AUTO	3	3	3
7	BIMA	3	3	3
8	BTON	3	3	3
9	CPIN	5	5	5
10	DLTA	3	3	3
11	DPNS	3	3	3
12	DVLA	3	3	3
13	EKAD	3	3	3
14	FASW	3	3	3
15	FPNI	3	3	3
16	GDYR	3	3	3
17	GGRM	4	3	3
18	HMSP	3	3	3
19	ICBP	3	3	3
20	IGAR	3	3	3
21	IMAS	3	3	3
22	INAF	3	2	2
23	INDF	3	3	3
24	INDS	3	3	3
25	JECC	3	3	3
26	KBRI	3	3	2
27	KDSI	3	3	3
28	KLBF	3	3	3
29	LMSH	3	3	3
30	MLBI	3	3	3
31	MYOR	3	3	3
32	RICY	3	3	3
33	ROTI	3	3	3
34	SIDO	3	3	3
35	SMGR	4	4	4
36	SMSM	3	3	3
37	SRSN	3	3	3
38	TOTO	3	3	3
39	UNVR	3	3	3
40	WIIM	3	3	3

## Lampiran VI

Tabel ukuran dewan komisaris

NO	KODE	2015	2016	2017
1	ADES	3	3	3
2	AKPI	6	6	6
3	ALDO	3	3	3
4	AMFG	4	6	6
5	ASII	11	11	12
6	AUTO	11	9	8
7	BIMA	3	3	3
8	BTON	2	2	2
9	CPIN	5	5	4
10	DLTA	5	5	5
11	DPNS	3	3	3
12	DVLA	7	6	7
13	EKAD	2	2	2
14	FASW	5	5	5
15	FPNI	2	2	2
16	GDYR	3	3	3
17	GGRM	4	4	4
18	HMSP	6	6	5
19	ICBP	6	6	5
20	IGAR	3	2	3
21	IMAS	6	7	7
22	INAF	3	3	3
23	INDF	8	8	8
24	INDS	3	3	3
25	JECC	3	3	3
26	KBRI	3	2	2
27	KDSI	4	5	5
28	KLBF	7	7	7
29	LMSH	3	3	3
30	MLBI	7	7	7
31	MYOR	5	5	5
32	RICY	3	3	3
33	ROTI	3	3	3
34	SIDO	3	3	3
35	SMGR	7	7	7
36	SMSM	3	3	3
37	SRSN	8	8	8
38	TOTO	5	5	5
39	UNVR	5	5	5
40	WIIM	3	3	3

Lampiran VII

Table jumlah rapat komite audit

NO	KODE	2015	2016	2017
1	ADES	4	2	3
2	AKPI	3	3	3
3	ALDO	14	6	6
4	AMFG	15	12	14
5	ASII	9	7	7
6	AUTO	6	7	7
7	BIMA	8	8	8
8	BTON	5	4	4
9	CPIN	22	22	28
10	DLTA	3	4	4
11	DPNS	4	4	4
12	DVLA	4	4	4
13	EKAD	6	6	6
14	FASW	14	14	14
15	FPNI	4	5	5
16	GDYR	4	4	4
17	GGRM	6	6	6
18	HMSM	4	5	6
19	ICBP	4	6	6
20	IGAR	4	4	4
21	IMAS	6	5	5
22	INAF	12	15	16
23	INDF	6	8	8
24	INDS	4	4	4
25	JECC	14	16	14
26	KBRI	4	4	4
27	KDSI	12	12	12
28	KLBF	4	4	4
29	LMSH	4	4	4
30	MLBI	6	6	6
31	MYOR	5	5	5
32	RICY	22	22	22
33	ROTI	4	4	4
34	SIDO	5	5	5
35	SMGR	25	22	20
36	SMSM	4	5	5
37	SRSN	6	4	4
38	TOTO	12	12	12
39	UNVR	4	4	4
40	WIIM	4	4	4

## Lampiran VIII

Table kepemilikan asing

NO	KODE	2015	2016	2017
1	ADES	0,9152	0,9152	0,9152
2	AKPI	0,3812	0,3812	0,3812
3	ALDO	0	0	0
4	AMFG	0,5084	0,5084	0,5084
5	ASII	0,9164	0,9164	0,8957
6	AUTO	0,1537	0,1537	0,15367
7	BIMA	0	0	0
8	BTON	0,00038	0,00038	0,00038
9	CPIN	0,3582	0,3582	0,3582
10	DLTA	0,5833	0,5833	0,5833
11	DPNS	0	0	0
12	DVLA	0,9213	0,9213	0,9213
13	EKAD	0,0519	0,0519	0,0519
14	FASW	0	0	0
15	FPNI	0,00021	0,00021	0,033
16	GDYR	0,85	0,85	0,85
17	GGRM	0,121	0,121	0,117
18	HMSP	0,03	0,03	0,02927
19	ICBP	0,1011	0,1011	0,0989
20	IGAR	0	0	0
21	IMAS	0,7149	0,7149	0,73484
22	INAF	0,01	0,01	0,0032803
23	INDF	0,83	0,83	0,8335
24	INDS	0	0	0
25	JECC	0,061	0,061	0,059
26	KBRI	0	0	0
27	KDSI	0,0008	0,0008	0,0008
28	KLBF	0,302	0,302	0,2908
29	LMSH	0,3222	0,3222	0,3222
30	MLBI	0,8178	0,8178	0,9529
31	MYOR	0,0811	0,0811	0,0868
32	RICY	0,351	0,351	0,4106
33	ROTI	0,605	0,605	0,6394
34	SIDO	0	0	0
35	SMGR	0	0	0
36	SMSM	0,2271	0,2271	0,152858
37	SRSN	0	0	0
38	TOTO	0,379	0,379	0,379
39	UNVR	0,936	0,936	0,9358
40	WIIM	0	0	0

## Lampiran IX

Tabel kepemilikan insitusional pemerintah

NO	KODE	2015	2016	2017
1	ADES	0	0	0
2	AKPI	0	0	0
3	ALDO	0	0	0
4	AMFG	0,401	0,42	0,4292
5	ASII	0,01	0,0127	0,0314
6	AUTO	0	0	0
7	BIMA	0	0	0
8	BTON	0,0001	0,01	0,01
9	CPIN	0	0	0
10	DLTA	0,2625	0,2625	0,28
11	DPNS	0	0	0
12	DVLA	0	0	0
13	EKAD	0	0	0
14	FASW	0	0	0
15	FPNI	0,0006	0,0006	0,0006
16	GDYR	0	0	0
17	GGRM	0	0	0
18	HMSP	0	0	0
19	ICBP	0	0	0
20	IGAR	0	0	0
21	IMAS	0	0	0
22	INAF	0,8709	0,8711	0,9
23	INDF	0,144	0,142	0,149
24	INDS	0	0	0
25	JECC	0,043	0,045	0,045
26	KBRI	0,07	0,072	0,106
27	KDSI	0	0	0
28	KLBF	0,005	0,01	0,021
29	LMSH	0	0	0
30	MLBI	0	0	0
31	MYOR	0,0632	0,0632	0,0632
32	RICY	0	0,051	0,041
33	ROTI	0	0	0
34	SIDO	0	0	0
35	SMGR	0,52	0,52	0,52
36	SMSM	0	0	0
37	SRSN	0	0	0
38	TOTO	0	0	0
39	UNVR	0,049	0,05	0,051
40	WIIM	0	0	0

## Lampiran X

Tabel ukuran perusahaan

NO	KODE	2015	2016	2017
1	ADES	27,2051859	27,3663639	27,4569486
2	AKPI	33,2950713	33,1978033	33,2460926
3	ALDO	26,6259292	26,74023	26,9352746
4	AMFG	29,0826993	29,3366579	29,4664491
5	ASII	33,1340533	33,198812	33,3201839
6	AUTO	30,2940042	30,3128642	30,3230774
7	BIMA	25,2155733	25,2455029	25,3240102
8	BTON	25,933387	25,9010562	25,9354895
9	CPIN	31,1171722	31,0092228	31,0118457
10	DLTA	27,6686271	27,8115052	27,9243196
11	DPNS	26,3381556	26,4140629	26,4549591
12	DVLA	27,950404	28,057181	28,1262575
13	EKAD	26,68862	27,277924	27,4038294
14	FASW	29,5760214	29,7808307	29,8685227
15	FPNI	28,7861119	28,6561009	28,5912617
16	GDYR	28,1162857	28,0604897	28,1529009
17	GGRM	31,7821463	31,7733878	31,8321242
18	HMSP	31,2688967	31,3807134	31,3954949
19	ICBP	35,5155976	35,6000329	35,6899811
20	IGAR	26,6737417	26,8088262	26,9635865
21	IMAS	30,8443214	30,8749017	31,0770325
22	INAF	28,0587094	27,9542872	28,0562071
23	INDF	32,1509768	32,0398663	32,1076701
24	INDS	28,5686538	28,5381793	28,5208107
25	JECC	27,9373758	28,0929992	28,2874967
26	KBRI	28,0066668	27,8650863	27,7890795
27	KDSI	27,7940695	27,7640413	27,9149148
28	KLBF	30,2481554	30,3540262	30,4414016
29	LMSH	25,6194831	25,8159613	25,8056848
30	MLBI	28,3733646	28,4530179	28,5513349
31	MYOR	30,0595969	30,189985	30,3334455
32	RICY	27,8118364	27,8846426	27,949071
33	ROTI	28,6266122	28,7024817	29,1482503
34	SIDO	28,6592506	28,7254962	28,7810227
35	SMGR	31,2726286	31,4203542	31,5220963
36	SMSM	28,428577	28,4440558	28,5243875
37	SRSN	27,076023	27,2985504	27,204424
38	TOTO	28,522831	28,5793689	28,6700571
39	UNVR	30,3865873	30,4491623	30,5705223
40	WIIM	27,9257037	27,933814	27,8345431

Lampiran XI

Hasil perhitungan statistik

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSRDI	120	,08	,33	,1824	,07112
Manajemen_Laba	120	-,35	,38	,0494	,08533
Ukuran_Komit	120	2,00	5,00	3,1083	,44525
Ukuran_Dewan_Komisaris	120	2,00	12,00	4,6250	2,20032
Jumlah_Rapat_Komite_Audit	120	2,00	28,00	7,5750	5,54684
Kepemilikan_Asing	120	,00	,95	,2902	,33888
Kepemilikan_Pemerintah	120	,00	,90	,0635	,17171
Ukuran_Perusahaan	120	25,22	35,69	29,0372	2,21920
Valid N (listwise)	120				

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,05625665
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,075
	Negative	-,078
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,072 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,150	,085		-1,769	,080		
	Manajemen_Laba	-,024	,065	-,029	-,378	,706	,926	1,080
	Ukuran_Komit	-,017	,016	-,106	-1,083	,281	,579	1,727
	Ukuran_Dewan_Komisaris	,003	,003	,106	1,053	,295	,556	1,800
	Jumlah_Rapat_Komite_Audit	,000	,001	,030	,303	,763	,554	1,806
	Kepemilikan_Asing	,001	,018	,003	,035	,972	,784	1,275
	Kepemilikan_Pemerintah	,170	,035	,409	4,851	,000	,784	1,276
	Ukuran_Perusahaan	,012	,003	,383	3,988	,000	,605	1,652

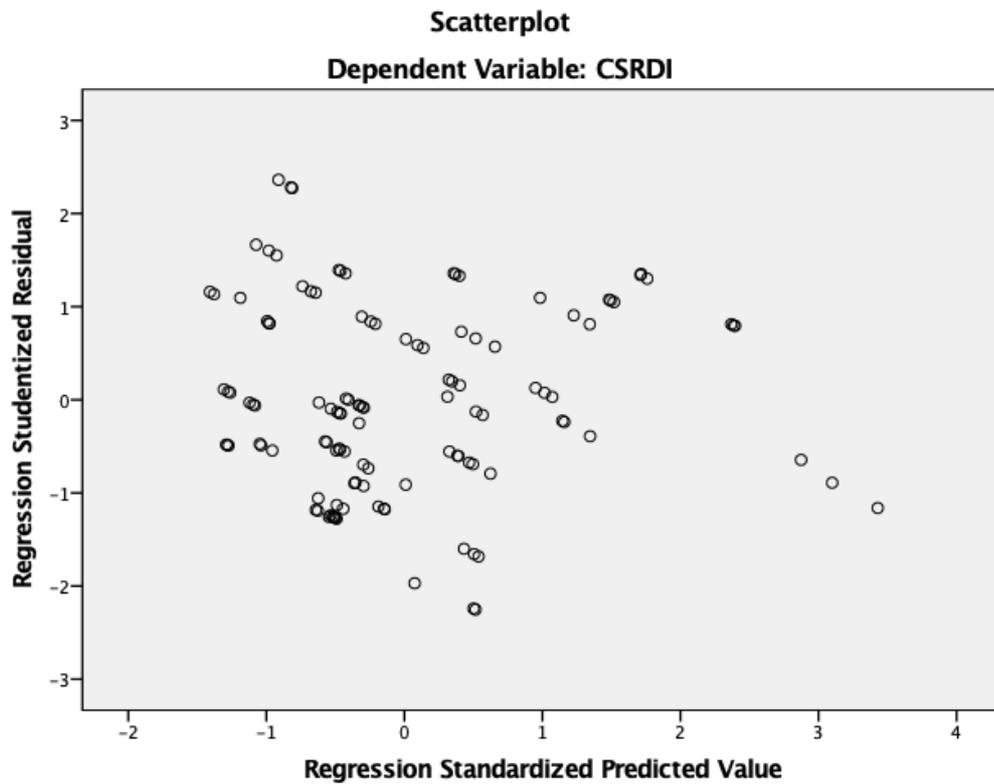
a. Dependent Variable: CSRDI

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,225	7	,032	9,574	,000 <sup>b</sup>
	Residual	,377	112	,003		
	Total	,602	119			

a. Dependent Variable: CSRDI

b. Predictors: (Constant), Ukuran\_Perusahaan, Kepemilikan\_Pemerintah, Manajemen\_Laba, Kepemilikan\_Asing, Ukuran\_Komit, Ukuran\_Dewan\_Komisaris, Jumlah\_Rapat\_Komite\_Audit



**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,612 <sup>a</sup>	,374	,335	,05799

a. Predictors: (Constant), Ukuran\_Perusahaan, Kepemilikan\_Pemerintah, Manajemen\_Laba, Kepemilikan\_Asing, Ukuran\_Komit, Ukuran\_Dewan\_Komisaris, Jumlah\_Rapat\_Komite\_Audit

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,150	,085		-1,769	,080
Manajemen_Laba	-,024	,065	-,029	-,378	,706
Ukuran_Komit	-,017	,016	-,106	-1,083	,281
Ukuran_Dewan_Komisaris	,003	,003	,106	1,053	,295
Jumlah_Rapat_Komite_Audit	,000	,001	,030	,303	,763
Kepemilikan_Asing	,001	,018	,003	,035	,972
Kepemilikan_pemerintah	,170	,035	,409	4,851	,000
Ukuran_Perusahaan	,012	,003	,383	3,988	,000

a. Dependent Variable: CSRDI

